

LAPORAN HASIL PENELITIAN

BIDANG KEILMUAN



UNIVERSITAS TERBUKA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUTORIAL TATAP

MUKA PENDIDIKAN DASAR (JKOP BB 03)

(Studi Di Unit Program Belajar Jarak Jauh – Universitas Terbuka Kupang)

Tim Pengusul

Ketua : Yusinta Natalia Fina, S.Sos, M,Si (yusinta@ut.ac.id)

Anggota : Junus Jeschial Beliu, S.Sos, M.Si

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS TERBUKA

KUPANG

2014

SURAT PERNYATAAN REVIEWER-1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP : 196606191992031002
Jabatan : Lektor Kepala

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUTORIAL TATAP MUKA
PENDIDIKAN DASAR (JKOP BB 03) (Studi Di Unit Program Belajar
Jarak Jauh – Universitas Terbuka Kupang)**
Peneliti : Yusinta Natalia Fina dan Junus Jeschial Beliu

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 11 Desember 2014
Penelaah,


Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
196606191992031002

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MULA

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Tutorial Tatap Muka Universitas Terbuka (Studi Di Unit Program Belajar Jarak Jauh - Universitas Terbuka Kupang)

Bidang Penelitian : Keilmuwan

Klasifikasi : Mula

Kode/Nama Rumpun Ilmu : Administrasi

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Yusinta Natalia Fina, S.Sos, M.Si/FISIP

b. NIDN : 0021128301

c. Jabatan Fungsional : Staf Pengajar

d. Program Studi : Administrasi Negara

e. Nomor Hp : 085339292772

f. Alamat surel (email) : yusinta@ut.ac.id

Anggota Peneliti (1) :

a. Nama Lengkap : Junus Jeschial Beliu, S.Sos, M.Si

b. NIDN : 0022058203

Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Kupang, 15 Desember 2014

Ketua Peneliti



Yusinta Natalia Fina, S.Sos, M.Si
NIP 19831221 200801 2 002

Mengetahui
Kepala UPBJJ-UT KUPANG



Drs. R. Alani Malau, M.Si
UPBJJ KUPANG 19530227 198603 1001

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kristanti Ambar Puspitasari, Ir., M.Ed, PhD
NIP. 196102121986032001

BAB. I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia modern pada saat ini. Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Pendidikan pada saat ini dengan mudah diakses, begitu banyak lembaga yang menawarkan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Lembaga pemerintah maupun swasta saat ini berlomba-lomba menawarkan layanan pendidikan baik itu secara tatap muka maupun jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas Terbuka (UT) adalah salah satu lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ). Interaksi antara mahasiswa dengan dosennya ditandai dengan keterpisahan secara fisik. Pembelajaran dilakukan melalui mediasi bahan ajar, baik yang cetak maupun non cetak. Karakteristik pembelajaran seperti itu menuntut mahasiswa untuk memiliki kemandirian tinggi dalam belajar. Kemandirian disini artinya segenap inisiatif dan ikhtiar belajar sepenuhnya ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Mahasiswalah yang menentukan kapan, dimana dan bagaimana dia belajar.

Mahasiswa Universitas Terbuka diharapkan belajar secara mandiri (Katalog UT, 2013: 1). Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efisien. Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Untuk dapat belajar mandiri secara efisien, mahasiswa Universitas Terbuka dituntut untuk memiliki disiplin diri, inisiatif dan motivasi belajar yang kuat. Mahasiswa juga dituntut juga untuk dapat mengatur waktunya secara efisien, sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditentukan sendiri. Oleh karena itu, agar dapat belajar di Universitas Terbuka (UT) calon mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri.

Namun demikian, tidak semua mahasiswa yang secara cepat mengadopsi sistem belajar mandiri sebagai budaya mereka. Terlebih-lebih bagi mereka yang memiliki minat dan kebiasaan membaca yang tidak terlalu tinggi, serta terbiasa

hidup dalam kultur belajar tatap muka dan terbimbing, dimana pelbagai masalah atau kesulitan belajar secara cepat dapat diselesaikan dengan guru atau pengajar. Universitas Terbuka menyadari kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswanya. Oleh karena itu, Universitas Terbuka menyediakan berbagai layanan bantuan belajar, di antaranya berupa tutorial bagi para mahasiswanya. Tutorial adalah layanan bantuan belajar kepada mahasiswa yang bersifat akademik. Dalam tutorial, kegiatan belajar mahasiswa dilakukan dibawah bimbingan tutor sebagai fasilitator (Katalog Universitas Terbuka, 2013). Tutorial ini dirancang secara khusus agar dapat membantu mahasiswanya dalam menguasai kompetensi suatu mata kuliah. Tutorial adalah pemicu sekaligus pemacu proses belajar mahasiswa. Kebijakan untuk memberikan bantuan belajar kepada mahasiswa dalam bentuk tutorial meskipun sudah dilaksanakan hampir 30 tahun tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala. Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu :

- 1) komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit oleh karena itu konsistensi dan atau keragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran dan tujuan kebijakan itu. Mengenai masalah komunikasi yang didapati pada implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang yaitu ada prosedur yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, seperti tutorial harus dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan dengan waktu setiap kali pertemuan adalah 120 menit masih tidak diikuti oleh beberapa pokjar dengan melaksanakan tutorial lebih dari 8 kali pertemuan dan setiap kali pertemuan hanya menggunakan waktu 90 menit. Padahal semua ketentuan tutorial sudah diketahui oleh para pengurus pokjar. Pola tutorial tidak mengikuti pola yang ditentukan oleh UT dan melaksanakan pola tutorial semi atau *fullblok* tapi tidak mengajukan ijin kepada PR III. Padahal semua prosedur mengenai pelaksanaan tutorial telah berikan UPBJJ-UT Kupang kepada para pengurus pokjar, tutor maupun mahasiswa.
- 2) Sumber-sumber : sumber daya merupakan sesuatu hal yang sangat dominan dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri, sebagai bentuk dari kebijakan

yang telah dibuat oleh para implementor perlu memperhatikan sumber daya yang ada di tingkat bawah sehingga pelaksanaan kebijakan yang ditempuh tidak salah sasaran bahkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Masalah sumber daya dalam implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang yaitu sumber daya manusia, menurut pedoman tutorial tutor/praktisi harus berpendidikan S2 tapi dilapangan menggunakan tutor dengan jenjang pendidikan S1. Selain itu tutor mentutorialkan mata kuliah yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

3) Sikap atau disposisi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan itu. Dukungan implementor sangat mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan itu diwujudkan dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Masalah disposisi dalam implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang seperti : ada tutor yang tidak membuat administrasi tutorial seperti RAT dan SAT, dua kelas tutorial digabung menjadi satu kelas tutorial

4) Struktur birokrasi, struktur birokrasi pada dasarnya merupakan suatu badan/organisasi penyelenggara kebijakan, apabila struktur birokrasinya dijalankan sesuai fungsi maka implemetasi kebijakan terarah sesuai dengan tujuan. Masalah struktur organisasi yang ditemui dalam implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang yaitu struktur tutorial/pembimbingan mata kuliah Praktek Kemampuan Profesional (PKP) dimana harus ada supervisor 2 yang berasal dari kepala sekolah dari masing-masing mahasiswa tapi dalam kenyataannya supervisor 2 bukan dari kepala sekolah tapi dari pembimbing yang ditunjuk oleh pengurus pokjar.

Kegiatan TTM dilaksanakan di setiap kelompok belajar (Pokjar) yang dibentuk berdasarkan wilayah. Tujuan dari pembentukkan kelompok belajar yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada mahasiswa UT yang sebagian besar berada di daerah terpencil. Setiap pokjar bertanggungjawab untuk mengurus semua urusan mahasiswa dari proses registrasi, tutorial, ujian, pengambilan nilai, wisuda, pengaduan, dan lain-lain. Jumlah kelas tutorial yaitu rata-rata 28 orang mahasiswa

untuk satu kelas tutorial. Data tutorial dari tahun 2012.2 sampai 2013.2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Data Tutorial di UPBJJ-UT Kupang

Masa Tutorial	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Kelas Tutorial	Jumlah Mata Kuliah Yang Ditutorialkan
2012.2	16232	579	1737
2013.1	15781	563	1689
2013.2	15232	544	1632

Sumber : UPBJJ-UT Kupang, 2014

Informasi Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kelas tutorial di UPBJJ-UT Kupang masa tutorial 2013.2 mencapai 1632 mata kuliah. Berdasarkan hasil monitoring tutorial yang dilakukan di beberapa tempat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tutorial tatap muka belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UT. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2 Data Penyimpangan Proses tutorial di UPBJJ-UT Kupang

No	Jenis Penyimpangan	Pokjar/KBM
1	Kelas Tutorial digabung menjadi 1 kelas tutorial	Waibalun, Mollo Selatan, Ende, Nelle
2	Pola Tutorial tidak mengikuti pola UT	Waibalun, Sumba Barat, Ende
3	Menggunakan pola semi blok tanpa ada ijin dari PR 3	Waibalun, Sumba Barat, Ende
4	Tutorial untuk semua mata kuliah tanpa ada permintaan tutorial ATPM	Waibalun, Nelle.
5	Tutor tidak membuat RAT/SAT	Waibalun,
6	Tidak ada catatan pertemuan tutorial	Waibalun, Adonara Timur, Wulanggintang
7	Tugas tutorial tidak diberikan dalam kelas tetapi di bawah pulang	Waibalun, Mollo Selatan, Waingapu
8	Tutorial lebih dari 8 kali pertemuan	Adonara Timur, Mollo

		Selatan
9	Waktu pertemuan setiap tutorial hanya 90 menit	Adonara Timur
10	Tutorial berlangsung diluar ruangan (di bawah pohon)	Nelle dan Waibalun
11	Latar belakang pendidikan tutor tidak relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan	KBM Atambua

Sumber : hasil monitoring TTM, 2013.2

Dari data monitoring tutorial di atas terlihat bahwa banyak ketentuan yang tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur pelaksanaan tutorial di UT, padahal prosedur TTM sudah diberikan oleh UPBJJ kepada pokjar baik secara tertulis maupun lisan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur TTM di UPBJJ UT Kupang dalam suatu penelitian yang berjudul **“Implementasi JKOP BB 03 Tentang Prosedur Tutorial Tatap Muka Universitas Terbuka (Studi Di Unit Program Belajar Jarak Jauh - Universitas Terbuka Kupang)”**

1.2 Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi dari JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi dari JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang.

2. Untuk menemukan faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di UPBJJ-UT Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi Universitas Terbuka dalam pemberian layanan tutorial tatap muka yang semakin baik bagi para mahasiswanya.
- b. Secara teoretis, temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan teori implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan lebih khususnya pendidikan jarak jauh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Malta (2011) tentang Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Tutorial Tatap Muka Program Pendidikan Dasar Di UPBJJ- UT Banda Aceh menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas TTM Program Pendas UPBJJ UT Banda Aceh adalah: sarana prasarana, peran UPBJJ UT, dan kuantitas tutorial. Ketiga faktor variabel bebas ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap efektivitas TTM. Sedangkan efektivitas tutorial berada pada tingkat sedang. Faktor lainnya mungkin juga berkaitan, tetapi porsi mereka dapat berada pada ketiga variabel bebas lainnya yang berkorelasi. Karena sebagian besar tutor belum memperoleh pelatihan, maka pelatihan tutor untuk UPBJJ-UT Banda Aceh harus segera dilakukan. Bila pelatihan ini tertunda lagi maka standar TTM akan sulit untuk terpenuhi. Selain itu, sebaiknya UT Pusat memberikan arahan kepada UPBJJ-UT tentang apa sebaiknya yang harus dilakukan agar fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan TTM dapat terpenuhi.

Penelitian lainnya mengenai kualitas pelaksanaan tutorial tata muka S1 Pendas di UPBJJ-UT Pangkal Pinang oleh Haholongan Simanjuntak dan Maman Rumanta (2013) menyebutkan bahwa kualitas pelaksanaan Tutorial Tatap Muka sudah baik terlihat dari, (1). Kehadiran dan peran serta mahasiswa dalam TTM cukup baik, hal ini terlihat pada saat tutorial berlangsung hampir semua mahasiswa hadir dan aktif. (2) Kebanyakan mahasiswa menginginkan agar semua matakuliah yang ditawarkan dilaksanakan tutorial tatap muka. (3) Pelaksanaan TTM 2011.2 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (4) TTM sangat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran di UT dan kegiatan ini dapat menghilangkan kesan bahwa kuliah di UT hanya cukup belajar menjelang UAS saja.

(5) Kemampuan Tutor TTM S-1 PGSD masa registrasi 2011.2 baik. Hal dikarenakan para tutor S1 PGSD sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan pembekalan tutor sebelum melaksanakan tutorial. Sehingga para tutor dapat mengetahui metode/cara melaksanakan tutorial dengan baik di Universitas Terbuka. (6) Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat baik dalam penyelenggaraan tutorial, hal ini dapat dilihat dengan penyediaan tempat TTM di gedung-gedung sekolah, penyediaan tempat tinggal bagi mahasiswa yang rumahnya jauh dari tempat tutorial serta menginformasikan kepada mahasiswa tentang waktu dan tempat pelaksanaan tutorial.

Rekomendasi dari penelitian adalah: (1) Kualitas tutor perlu terus ditingkatkan baik dari segi materi, metode dan strategi pembelajarannya dengan memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkesinambungan. (2) Untuk mengontrol agar pelaksanaan TTM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka evaluasi tutor, monitoring dan evaluasi tutorial perlu tetap dilaksanakan secara berkelanjutan (3) Koordinasi antara UPBJJ-UT dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam merekrut mahasiswa dan melaksanakan TTM di daerah.

Dua penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam TTM efektifitas tutorial belum maksimal dilaksanakan baik dari aspek tutor dan aspek manajemen seperti kurangnya monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan TTM. Penelitian ini lebih memfokuskan pada proses implementasi

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi Masyur dari Dye (Indiahono, 2009:17) adalah apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun yang implisit merupakan kebijakan. menurut Dye kebijakan publik harus dimaknai dengan dua hal penting ; pertama, bahwa kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu Lasswell (1951) menginginkan ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang (Indiahono, 2009:17). Sedangkan Anderson (Widodo, 2006:13) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan pengertian kebijakan menurut para ahli maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang diinginkan (Wahab dalam Widodo, 2006:13).

2.3 Implementasi, Arti dan Cakupannya

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2006).

Mazmanian dan Sabatier (Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Riant Nugroho (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, output dan outcome (Kusumanegara, 2010)

Ripley dan Franklin (1982:4) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh, menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Selanjutnya van Meter dan van Horn (1975 : 447) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Indiahono (2011:), implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh

oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasa dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

James Anderson (1979) menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana dikatakan oleh Anderson digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan. Menurut Matland (Nugroho, 2006) metode implementasi kebijakan dapat berpatokan pada matriks Ambiguitas – Konflik.

Tabel 3
Matriks Ambiguitas – Konflik Implementasi kebijakan Model Matlad

		Konflik	
		Rendah	Tinggi
Ambiguitas	Rendah	Implementasi secara administratif	Implementasi secara politik
	Tinggi	Implementasi secara eksperimental	Implementasi secara simbolik

Sumber : Nugroho, 2006

Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi politik adalah implemetasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya

rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi.

2.3.1 Aktor Implementasi

Michael Hill dan Peter Hupe (2002) membagi keaktoran implementasi kebijakan secara periodik. Periode pertama yang disebut periode *intervensionis* berlangsung antara 1930 – 1980. Pada periode ini Pemerintah (atau negara) merupakan aktor utama (kadang satu-satunya) yang melaksanakan kebijakan publik. Antara 1980 -1990, muncul model yang disebut “*market and corporate goverment*” yang juga dapat disebut “*strong civil society*”; disini peran implementasi kebijakan diserahkan kepada publik atau pasar melalui mekanisme *contrancting out*, kerja sama ataupun privatisasi. Periode ketiga adalah pasca 1990-an, dengan berkembangnya pragmatisme dalam implementasi kebijakan. Para pelaku implementasi keserahkan pada kebutuhan pragmatis dari kebijakaan itu sendiri. Dapat berpola *goverment driven* atau *parthership*, ada pula yang diserahkan kepada pasar. Pendekatan ini berkembang terutama setelah swastanisasi implementasi kebijakan publik secara ekstrem tidak menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

2.3.2 Model – Model Implementasi

Model – Model Implementasi (dalam Indiahono, 2009)

1. Model George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawahnya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

2. Model Implementasi Kebijakan Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan (Indiahono, 2009)

3. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn (Indiahono, 2009), ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumberdaya; 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas; 4) karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik (dalam Indiahono, 2009)

2.3.4 Prosedur Tutorial Tatap Muka (JKOP BB 03)

1. Tujuan

- 1.1 membantu meningkatkan efektifitas belajar mahasiswa
- 1.2 memastikan proses tutorial efektif dan terkendali
- 1.3 memastikan rekapitulasi nilai tutorial lengkap, benar dan dapat diproses tepat waktu untuk semua mata kuliah yang ditutorialkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 prosedur ini menjelaskan pengelolaan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan pengolahan nilai) tutorial tatap muka yang wajib disediakan atau atas permintaan mahasiswa untuk semua program studi dan jenjang yang ditawarkan
- 2.2 prosedur ini digunakan untuk mata kuliah yang pada catalog dinyatakan :
 - mata kuliah tanpa praktek/praktikum dengan tanpakode “T”
 - mata kuliah berpraktikum dengan penilaian tugas oleh tutor.

3. Definisi

- 3.1 tutorial tatap muka : salah satu bentuk layanan bantuan belajar yang ditandai dengan adanya pertemuan langsung secara tatap muka antara tutor dengan mahasiswa.
- 3.2 Tutorial tatap muka wajib : tutorial tatap muka yang sifatnya wajib disediakan oleh UT karena materi kuliah terkait dinilai sulit bila hanya dipelajari sendiri oleh mahasiswa.
- 3.3 Tutorial tatap muka atas permintaan : tutorial tatap muka yang disediakan oleh UT atas permintaan mahasiswa.
- 3.4 Tutor : tenaga akademik yang bertugas memfasilitasi proses belajar mahasiswa dengan penekanan pada penguasaan dan pendalaman materi kuliah sesuai bahan ajar.
- 3.5 Tugas tutorial : tugas yang diberikan tutor kepada mahasiswa untuk membangun pemahaman mahasiswa atas materi mata kuliah
- 3.6 Nilai partisipasi : nilai kehadiran dan keterlibatan mahasiswa dalam tutorial. Nilai partisipasi mahasiswa menunjukkan disiplin dan tanggungjawab dalam mengerjakan tugas-tugas, kehadiran serta keaktifan dalam tutorial yang tercermin dalam bentuk bertanya, mengungkapkan pendapat, dan bekerja sama dengan teman.
- 3.7 BBLBA : bantuan belajar dan layanan bahan ajar, unit/bagian di UPBJJ UT yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tutorial.
- 3.8 Pokjar ; kelompok belajar mahasiswa yang terdiri dari beberapa kelas di satu lokasi.
- 3.9 Supervisi : pengawasan yang dilakukan oleh staf UT Pusat untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tutorial.
- 3.10 Monitoring : pengawasan yang dilakukan oleh staf UPBJJ UT untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tutorial.

4. Ketentuan Umum

- 4.1 Tutorial satu mata kuliah diberikan hanya kepada mahasiswa UT yang sudah mendaftarkan mata kuliah tersebut pada suatu semester.
- 4.2 Jumlah peserta tiap kelas adalah 20 sampai 30 orang.
- 4.3 Jumlah peserta TTM tiap kelas digunakan sebagai acuan jumlah entry nilai tutorial.
- 4.4 Nilai tutorial terdiri dari nilai tugas dan nilai partisipasi. Nilai tutorial akan memberikan kontribusi 50 % terhadap nilai akhir.
- 4.5 Tugas tutorial diberikan di dalam kelas kecuali untuk mata kuliah yang tugasnya tidak dimungkinkan dilakukan dalam kelas, misalnya tugas untuk membuat alat peraga, menyusun proposal, menyusun laporan atau menyusun karya ilmiah.
- 4.6 Terdapat tiga tugas tutorial yang diberikan pada pertemuan ke 3, 5, dan 7
- 4.7 Mahasiswa berhak atas nilai partisipasi apabila hadir minimal 5 kali pertemuan. Bila mahasiswa hadir kurang dari 5x langsung nilai tutorial =0
- 4.8 TTM dapat dilakukan mulai 1 bulan setelah masa registrasi dimulai dan harus berakhir 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian
- 4.9 TTM dilaksanakan 8x pertemuan (@120 menit) dalam 8 minggu untuk setiap mata kuliah.
- 4.10 TTM *semi block* dilaksanakan 8x pertemuan dalam 4 sampai dengan 7 minggu untuk setiap mata kuliah
- 4.11 TTM *full block* dilaksanakan 8x pertemuan dalam 8 hari (1 minggu) untuk setiap mata kuliah.
- 4.12 TTM *full block* dan *semi block* dapat dilaksanakan atas izin Pembantu Rektor III.
- 4.13 Satu orang tutor dapat memberikan tutorial maksimal 4 mata kuliah atau 5 maksimal 5 kelas persemester/per periode (antar periode tidak ada tumpang tindih).
- 4.14 RAT-SAT dicetak dari website UT : kit.tutor.ut.ac.id namun bila perlu SAT dapat disusun oleh tutor mata kuliah dan digunakan setelah disahkan oleh Kepala UPBJJ-UT.

4.15 Tugas tutorial dikembangkan oleh masing-masing tutor mengacu pada rancangan tugas tutorial yang ada pada Kit tutorial.

4.16 Perlengkapan tutor adalah property UT yang dibagikan kepada tutor sebagai alat acuan kerja. Kit tutor harus dikembalikan lengkap sebelum honor tutor dapat dibayarkan.

4.17 Monitoring dilakukan secara sampling padam minimum 30% lokasi tutorial. Petugas monitoring terutama adalah staf akademik yang ada di UPBJJ. Lokasi yang menjadi sampel dipilih dengan mempertimbangkan :

- Hasil evaluasi pelaksanaan tutorial sebelumnya.
- Hasil evaluasi tutor oleh mahasiswa.
- Lokasi/pokjar/tutor baru.

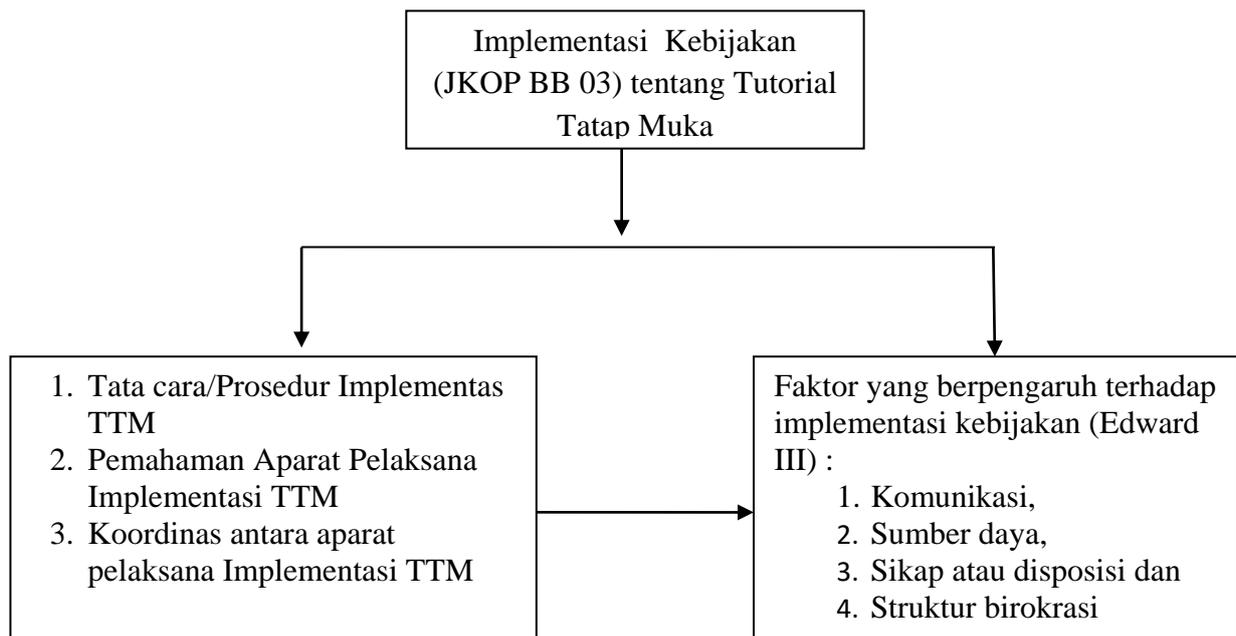
2.4 Kerangka Berpikir

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan tutorial tatap muka dengan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Tujuan kebijakan tutorial tatap muka yaitu untuk membantu meningkatkan efektifitas belajar mahasiswa serta memastikan proses tutorial berlangsung efektif dan terkendali. Meski sudah dilaksanakan implementasi kebijakan tutorial tatap muka belum efektif dilaksanakan karena terbentur dengan berbagai hambatan.

Dalam menganalisis permasalahan implementasi kebijakan tutorial, peneliti menggunakan pendekatan yang digagas oleh Edward III dan para ahli lainnya antara lain Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Grindle dan lain-lain. Pendapat dari para ahli ini lebih menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan, faktor penghambat implementasi kebijakan. Selain itu peneliti juga akan meneliti mengenai output dari kebijakan tutorial tatap muka. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait yakni unsur input, proses, output, saluran *feedback*, dan lingkungan tempat unsur-unsur tersebut beroperasi. Suatu perubahan dalam suatu unsur, akan mengakibatkan perubahan pada unsur yang lain (Teori Sistem Robert Wiener, dalam kadarwati, 2007).

Implementasi kebijakan menurut George Edward III adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi dari banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi serta stuktur birokrasi. Faktor-faktor ini akan saling mendukung untuk memperlancar proses implementasi kebijakan. Jika ada satu faktor bermasalah maka faktor lainpun turut bermasalah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk merumuskan kembali kebijakan sekaligus sebagai penyempurna suatu kebijakan yang diambil dan akan diimplementasikan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di UPBJJ-UT Kupang dan secara *purposive sampling* dipilih 2 pokjar di kabupaten Flores Timur yaitu pokjar Adonara Timur dan Pokjar Bina Wirawan Waibalun. Alasan dipilihnya kedua pokjar ini adalah pokjar-pokjar yang jumlah peserta dan kelas tutorial yang banyak dan pokjar-pokjar ini merupakan wilayah tanggungjawab dari peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan TTM di UPBJJ-UT Kupang yang dilihat dari aspek realisasi tata cara/prosedur implementasi TTM di lapangan, tingkat pemahaman aparat pelaksanaan implementasi TTM dan koordinasi antara aparat pelaksana.

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dikaji dari aspek komunikasi yang di lihat dari unsur transmisi, konsisten, kejelasan dan sebelumnya dikaji intensitas sosialisasi mengenai TTM. Dari aspek sumber daya dikaji dari unsur sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan fasilitas. Faktor berikutnya Disposisi dikaji dari tindakan pelaksana, dan faktor terakhir struktur organisasi dilihat dari unsur standar operasi prosedur

3.3 Informan dan Sumber Data Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja, yakni semua pihak yang dapat membantu peneliti dalam

memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti dan mengetahui dengan jelas tentang implementasi kebijakan TTM. Informan dalam penelitian ini dipaparkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4
Profil Informan

NO	Stakeholder	Informan	Jumlah
1	UPBJJ-UT Kupang	1. Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar	1
2	Kelompok Belajar (pokjar)	1. Pengurus Pokjar	2
		2. Tutor	2
3	Mahasiswa	Peserta tutorial di pokjar	2

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah ;

1. Data sekunder diperoleh melalui :

Studi kepustakaan yang bersumber pada laporan-laporan, dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama mengenai implementasi kebijakan TTM Pendas di UPBJJ-UT Kupang. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

2. Data primer diperoleh melalui :

Mencari data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi lengkap.

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder akan disusun, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5 Format Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Rencana Kegiatan perbulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan usulan Peneliti	■	■										
2.	Studi Literatur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Pengumpulan Data				■	■	■						
4.	Pengolahan Data							■	■				
5.	Analisis Data								■	■			
6.	Penyusunan Laporan penelitian									■	■		
7.	Presentase laporan penelitian											■	
8.	Perbaikan												■

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

UPBJJ–UT Kupang merupakan salah satu dari 32 UPBJJ – UT yang ditetapkan berdasarkan SK Mendikbud No: 0389/O/1984. Tujuan penetapan UPBJJ – UT disetiap Provinsi sangat diperlukan guna memperluas jangkauan Universitas Terbuka di daerah. Sejak ditetapkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 0389/O/1984, tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Terbuka, dimana kehadiran UPBJJ – UT untuk memperluas daya jangkau UT ke daerah, UPBJJ – UT Kupang merupakan salah satu UPBJJ-UT yang ada sejak dari tahun 1984. Wilayah pelayanan UPBJJ-UT Kupang tersebar pada 21 Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Timur.

4.1.2 Identitas

a. Identitas Umum

Nama UPBJJ : Kupang

Alamat : Jl. Pulau Indah No.6 Kelurahan Oesapa Barat
Kecamatan Kelapa Lima Kupang, NTT 85111

No. Telepon : (0380) 8553825

No. Faksimil : (0380) 8553813

Homepage dan E-Mail : ut-Kupang@upbjj.ut.ac.id

Website : www.upbjjkupang.ut.ac.id

Nomor dan Tanggal

SK Pendirian UPTTJJ/UPBJJ : SK Mendikbud No: 0443/P/1986, Tanggal 7
Juli 1986

Pejabat yang Menerbitkan SK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

b. UPBJJ-UT Kupang melaksanakan segala kegiatan akademik (registrasi, tutorial dan ujian) di 22 ibukota Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dimana terdapat setiap pengurus kelompok belajar

(Pokjar) mahasiswa UT yang membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut.

4.1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan UPBJJ-UT Kupang

a. Visi

Menjadi UPBJJ-UT yang berkualitas dalam bidang PTJJ untuk membantu mewujudkan Universitas Terbuka sebagai salah satu institusi PTJJ unggulan di antara institusi PTJJ di Asia 2010 dan dunia 2020.

b. Misi

1. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui layanan bantuan belajar.
3. Memastikan penyelenggaraan evaluasi proses dan hasil belajar dilakukan secara kredibel.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna dalam pendidikan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).
5. Menyebarluaskan dan berbagai informasi tentang PTJJ secara inovatif dan berkesinambungan.
6. Memperkokoh persaudaraan dan kesatuan bangsa khususnya di wilayah NTT melalui pendidikan secara luas dan merata
7. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerjasama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal dan nasional

c. Tujuan :

1. Secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen kualitas UT demi meningkatkan layanan registrasi, distribusi bahan ajar, bantuan belajar, evaluasi hasil belajar, administrasi kelulusan dan sertifikasi di wilayah NTT.
2. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain yang seluas-luasnya termasuk dengan pihak swasta dalam penyediaan

- layanan pendidikan dengan asas kesetaraan dan keadilan guna meningkatkan jangkauan dan angka partisipasi mahasiswa.
3. Memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara terintegrasi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara efektif.
 4. Memanfaatkan berbagai teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan penyebarannya.

Tabel 6 Lokasi Tutorial di UPBJJ-UT Kupang 2014.1

No	Kabupaten	Jumlah pokjar	Jumlah mahasiswa		Jml	Jumlah kelas tutorial	Jumlah tutor
			S1 PGSD	S1 PGPAUD			
1	KOTA KUPANG	1	233	201	434	14	42
2	KAB. KUPANG	7	718	-	718	26	78
3	TIMOR TENGAH SELATAN	11	1287	-	1287	50	150
4	TIMOR TENGAH UTARA	2	1093	-	1093	45	135
5	BELU	1	172	-	172	6	18
6	MALAKA	1	659	43	702	25	75
7	ROTE NDAO	5	478	22	500	18	54
8	SABU RAIJUA	2	239	-	239	9	27
9	ALOR	1	336	84	420	15	45
10	LEMBATA	4	749	155	904	34	102
11	FLORES TIMUR	5	735	277	1012	37	111
12	SIKKA	4	1297	199	1496	55	165
13	ENDE	1	511	111	622	21	63
14	NGADA	1	58	17	75	3	9
15	NAGEKEO	1	321	-	321	10	30
16	MANGGARAI TIMUR	1	819	50	869	29	87
17	MANGGARAI	1	23	151	174	8	24
18	MANGGARAI BARAT	1	384	17	401	14	42
19	SUMBA TIMUR	1	551	347	898	29	87
20	SUMBA TENGAH	1	443	200	643	26	78
21	SUMBA BARAT	1	328	99	427	15	45
22	SUMBA BARAT DAYA	1	1050	-	1050	34	102
JUMLAH		54	12484	1973	14457	523	1569

sumber : UPBJJ-UT Kupang, 2014.1

Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa di UPBJJ-UT Kupang terdapat 54 lokasi tutorial yang tersebar di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah peserta tutorial di masa 2014.1 sebanyak 14.457 peserta dan itu terbagi dalam 523 kelas tutorial dengan jumlah tutor sebanyak 1.569 orang.

Tabel 7
Peserta tutorial di Pokjar-pokjar di Wilayah Kabupaten Flores Timur

NAMA POKJAR	PGSD										JML	PAUD									JML
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOLOR BARAT	22			23							45										
SOLOR TIMUR									43		43										
WAIBALUN	26		41		54		48	59	35	59	322	31	31			26		36		124	
WULANGGITANG						20		25			45			30						30	
ADONARA TIMUR	31	25		38		36	55		49		234		22		18			33		73	
	79	25	41	61	54	56	103	84	127	59	689	31	53	30	18	26		69		227	

Sumber : UPBJJ-UT Kupang, 2014.

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa di kabupaten Flores Timur ada 5 pokjar UT. Kelima pokjar ini terletak di tiga pulau besar di kabupaten Flores Timur. Pokjar Wulanggintang dan Waibalun terletak di satu pulau, pokjar Solor Timur dan Solor Barat terletak di Pulau Solor dan pokjar Adonara Timur terletak di pulau Adonara. Terlihat juga bahwa dua pokjar Adonara Timur dan Waibalun memiliki jumlah peserta yang banyak dan disetiap program studi PGSD maupun PGPAUD ada mahasiswanya dan tersebar hampir disemua semester. Untuk pokjar Waibalun dikelola oleh Yayasan Susteran Katholik dan pokjar Adonara Timur dikelola oleh UPTD Dinas Pendidikan kecamatan Adonara Timur. Terlihat pada tabel sebelumnya bahwa jumlah tutor secara keseluruhan di Kabupaten Flores Timur sebanyak 111 orang. Ini merupakan jumlah yang besar.

Tabel 8
Peserta TTM Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Pokjar	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Waibalun	249	321	570
Adonara Timur	238	142	380
Jumlah	487	463	950

Sumber : data Pengurus Pokjar, 2014

Di ke dua pokjar ini terlihat bahwa jumlah peserta tutorialnya lebih banyak kaum perempuan. Ini menandakan bahwa minat perempuan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi lebih banyak dari kaum laki-laki.

Sedangkan latar belakang pendidikan mahasiswa di pokjar Waibalun dan Adonara Timur terlihat di tabel 9.

Tabel 9
Peserta TTM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Nama Pokjar	Latar Belakang Pendidikan		Jumlah
	Masukan SMA	Masukan D2	
Waibalun	483	87	570
Adonara Timur	380	-	380
Jumlah	863	87	950

Sumber : data Pengurus Pokjar, 2014

Data pada tabel memperlihatkan bahwa masukan SMA lebih banyak dari masukan D2.

Sedangkan latar belakang pendidikan tutor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Latar Belakang Pendidikan Tutor

Nama Pokjar	Latar Belakang Pendidikan		Jumlah
	S1	S2	
Waibalun	33	3	36
Adonara Timur	27	-	27
Jumlah	60	3	63

Sumber : UPBJJ-UT Kupang, 2014

Terlihat bahwa tingkat pendidikan tutor yang strata 2 baru tiga orang sisanya semua berlatar pendidikan strata 1.

B. Hasil Penelitian

a. Tata cara/prosedur dalam Implementasi TTM

Tutorial tatap muka adalah salah satu bentuk layanan bantuan belajar yang ditandai dengan adanya pertemuan langsung secara tatap muka antara tutor dengan mahasiswa, sedangkan Tutorial tatap muka wajib merupakan tutorial tatap muka yang sifatnya wajib disediakan oleh UT karena materi kuliah terkait dinilai sulit bila hanya dipelajari sendiri oleh mahasiswa. Untuk melaksanakan TTM yang bermutu maka perlu dibuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan TTM yang baik.

Melalui proses perumusan yang baik maka lahirlah JKOP BB 03. Tujuannya untuk membantu meningkatkan efektifitas belajar mahasiswa, memastikan proses tutorial efektif dan terkendali serta memastikan rekapitulasi nilai tutorial lengkap, benar dan dapat diproses tepat waktu untuk semua mata kuliah yang ditutorialkan.

Prosedur awal TTM dimulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan pengolahan nilai) tutorial tatap muka yang wajib disediakan atau atas permintaan mahasiswa untuk semua program studi dan jenjang yang ditawarkan. Prosedur ini digunakan untuk mata kuliah yang pada katalog Universitas Terbuka dinyatakan mata kuliah tanpa praktek/praktikum dengan tanpa kode “T” dan mata kuliah berpraktikum dengan penilaian tugas oleh tutor.

Berikut petikan wawancara dengan Pak Wise Silalahi selaku koordinator BBLBA di UPBJJ-UT Kupang mengenai prosedur implementasi Tutorial Tatap Muka :

“TTM mulai dilaksanakan dari tahap registrasi dimana mahasiswa yang sudah mendaftarkan dengan membayar biaya kuliah di bank sudah secara otomatis menjadi peserta tutorial, ini berlaku bagi mahasiswa pendas (S1 PGSD/S1PGPAUD) yang masih dalam paket semester. Untuk S1 PGSD dari semester 1 -10 dan S1 PGPAUD dari semester 1 sampai 9. Untuk administrasi tutor yakni para tutor harus memasukkan kelengkapan administrasi tutorial berupa lamaran untuk menjadi tutor, surat pernyataan, curriculum vitae. Selain itu tutor juga harus memasukkan perencanaan tutorial berupa RAT, SAT, rancangan tugas sebanyak 3 buah, dan rancangan bahan presentasi. Semua berkas itu harus dikirim sebelum tutorial dilaksanakan di tiap pokjar. Jadwal tutorial itu dimulai berdasarkan ketentuan yang tertera di kalender akademik yaitu dimulai satu minggu setelah penutupan registrasi. Apabila jumlah peserta tutorial sudah diketahui maka ditentukan jumlah kelas tutorial dan akan dilanjutkan dengan pembekalan bagi para tutor yang dilakukan oleh para staf UPBJJ-UT Kupang. Satu kelas tutorial maksimal peserta tutorialnya berjumlah 35 mahasiswa. Setelah tutorial berjalan akan ada monitoring tutorial yang dilakukan oleh para petugas dari UPBJJ-UT Kupang. Monitoring hanya dilakukan kepada 30% pokjar yang ada. Jumlah Pokjar yang ada sekitar 54 pokjar sehingga yang dimonitoring 30% dari 54 pokjar sekitar 16 pokjar.” waktu tutorial sesuai dengan aturan 120 menit (2 jam) bagi satu mata kuliah. Tutorial yang ideal adalah menggunakan pola biasa dimana satu minggu untuk satu mata kuliah.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam Implementasi TTM di UPBJJ-UT Kupang. Salah satu pihak yang mempunyai andil besar dalam suksesnya kegiatan TTM yaitu pengurus pokjar. Bapak Samsudin Subang (Pengurus Pokjar Adonara Timur) menjelaskan mengenai tata cara/prosedur dalam Implementasi TTM :

“Di pokjar saya para tutor dan mahasiswa diberikan jadwal tutorial dan lokasi tutorialnya. Dan kegiatan/pelaksanaan tutorial dilaksanakan sesuai jadwal yang kami berikan. Hanya di pokjar kami tutorial dilaksanakan sebanyak 12x pertemuan dengan waktu 1 kali pertemuan 90 menit, ini saya lakukan karena lokasi tutorial dengan jarak jangkauan mahasiswa bervariasi karena koneksi geografis tidak sama. Selain itu rata-rata mahasiswa adalah sedang mengajar, dimana selesai KBM di sekolah masing-masing antara jam 12.00-12.30 wita dan sisa waktu yang ada disiapkan untuk ke tempat tutorial”.

Beliau menyatakan alasannya :

“Bahwa prosedur seperti ini kami tempuh adalah baik karena mahasiswa banyak, dan tersebar pada 8 Kecamatan dan ada yang di pulau lain sehingga dengan cara seperti ini semua yang terlibat mempunyai pegangan yang sama untuk ditaati”.

Sedangkan alasan mengenai waktu tutorial:

“Untuk 1 mata kuliah jam tutorialnya 90 menit, banyaknya tutorial untuk 1 mata kuliah 12 kali maka total jam tutorial 1.080 menit (18 jam). Jika tiap mata kuliah ditutorialkan 8 kali dengan jam tutorial 120 menit maka total jam tutorial 960 menit (16 jam). Dengan demikian di Pokjar Adonara Timur masih lebih 120 menit (2 jam) menurut tutor dan mahasiswa lebih baik.

Prosedur pelaksanaan tatap muka di pokjar Adonara Timur menurut kami baik karena baik tutor mahasiswa maupun pengurus tidak mengalami hambatan.”

Pernyataan dari pengurus pokjar di atas juga dibenarkan oleh mahasiswa Evarista Weo mahasiswa S1 PGSD dari pokjar Adonara Timur mengatakan bahwa :

“Sebagai mahasiswa mereka mendapat informasi tutorial dari pengurus pokjar melalui sms kepada seluruh mahasiswa, lalu mereka saling memberitahu teman mereka masing-masing”. Informasi tutorial kita dapat dari sms, komunikasi dengan pengurus sangat lancar, hanya yang tinggal di jauh-jauh yang agak sulit, mereka dapat informasi dari teman karena rumah mereka berada dikampung-kampung atau di belakang gunung.”

Hal yang hampir sama juga ditegaskan oleh Ahmad Bata mahasiswa S1 PGSD lainnya dari pokjar Adonara Timur :

“Tutorial di pokjar Adonara Timur diadakan 2x seminggu jadwal itu sama dari semester 1 sampai semester 7. Informasi tutorial didapat dari panitia yang bagi selebar kertas mengenai urutan kegiatan tutorial atau yang disebut jadwal tutorial. Di jadwal ada tentang mata kuliah, hari pelaksanaan dengan nama tutor yang mengasuh, membawah materi tersebut. Lokasi tutorial ditentukan pengurus dalam jadwal yang dibagi kepada tiap mahasiswa. Semua mahasiswa dapat jadwal.

Tutorial dibagi dalam kelas A, B, mata kuliah yang ditutorialkan tiap semester hanya 3 yang wajib, tutorial dalam 1 hari mendapat 2 mata kuliah yang dipelajari.

Kelas dibagi menjadi dua kelas karena jumlah semester 7 sebanyak 54 orang itu data real sedangkan data awal sebanyak 61 mahasiswa. Waktu yang diberikan pusat (UT) sebanyak 120 menit yang digunakan 90 menit, mengingat kami tersebar dari beberapa kecamatan di Adonara. Dalam beberapa pembelajaran kelas digabungkan karena disesuaikan dengan jumlah ruangan. Pada semester 6, digabung dalam mata kuliah Bahasa Inggris itu inisiatif tutor karena jumlah mahasiswa yang hadir sedikit saja agak repot karena jumlah kelas yang satu sedikit sedangkan yang satu banyak (mahasiswa).

Tugas tutorial dikerjakan di rumah. Bentuk tugasnya ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Tugas kelompok buat laporan, bikin makalah, mengamati ada masalah tidak, seperti dalam mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan (PBK) kita disuruh mengamati yang terjadi di masyarakat. Tugas mandiri kadang disuruh ringkas materi yang ada atau materi-materi dan masalah-masalah yang ditemukan oleh tutor. Seperti di Statistika disuruh cari modus, median, mean, kemiringan dan lain-lain. Pada tutorial ke satu itu tutor kasi pengenalan materi dengan peta konsep.”

Sedangkan menurut penuturan dari Margaretha Ana Da Yela, salah satu tutor dari Adonara Timur mengenai prosedur tutorial :

“Informasi tutorial diterima dari ketua pokjar Adonara Timur. Selanjutnya menerima jadwal dan selanjutnya menerima arahan pendampingan sesuai mata kuliah yang akan diberikan kepada kami diberi panduan/modul dan hal-hal yang penting lainnya sehubungan dengan tata tertib pelaksanaan tutorial. RAT/SAT semester ini baru dibuat, semester lalu (2014.1) tidak dibuat karena tidak tahu. Saya sudah 2 tahun menjadi tutor dari tahun 2012.”

Ibu Magdalena menyatakan tanggapannya :

“Terhadap apa yang dibuat pokjar Adonara Timur sangat baik dan sangat membantu kami dalam melancarkan kegiatan tutorial.

Menurut kami pasti ada pertimbangan positif, karena dengan ini semua informasi dapat kami terima/informasi timbal balik demi kelancaran tutorial sehingga tidak ada pihak yang dirugikan”.

UPBJJ-UT Kupang juga mempunyai peranan dalam implementasi TTM di mata pengurus pokjar Adonara Timur :

“Tugas UPBJJ dalam mengimplementasi tutorial tatap muka adalah memberikan petunjuk, memantau dan mengendalikan semuanya”.

Dari sisi mahasiswa melihat tugas UPBJJ-UT Kupang

“Untuk mengedarkan modul dan juga nilai-nilai bermasalah bisa diajukan. Menyangkut tutorial biasa ada tim dari Kupang yang datang supervisi/tinjau untuk melihat tutorial di lapangan. Kami diedarkan angket untuk masukan untuk tutor yang membawahi materi, pas atau tidak pas.”

Disini terlihat bahwa mahasiswa belum paham mengenai peranan UPBJJ-UT Kupang, pihak UPBJJ hanya dilihat sebagai pengedar modul, dan angket dalam implementasi TTM.

Sedangkan mengenai pola tutorial, terlihat bahwa pokjar masih kurang memahami sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Samsudin bahwa pola implementasi TTM di pokjar Adonara Timur :

“Tutor bersama mahasiswa bertemu di kelas, mahasiswa menyampaikan permasalahan yang ditemukan saat mengkaji modul, permasalahan dibahas ada kalanya dengan tanya jawab antar tutor dengan mahasiswa, ada kalanya diselesaikan oleh mahasiswa dalam panduan tutor”.

Dari pengamatan pola tutorial di Adonara Timur menggunakan pola biasa dimana tutorial untuk satu mata kuliah dilaksanakan pada setiap minggu. Dari jadwal tutorial terlihat bahwa tutorial dilaksanakan mulai dari minggu kedua bulan September 2014 dan berakhir pada minggu ke 3 Nopember 2014. Dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu untuk semester II PGSD, II PGPAUD, IV PGSD dan VII PGSD. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu TTM untuk semester I PGSD, IV PGSD, VI PGSD, VII PGSD dan IX PGSD. Lokasi tutorial menggunakan dua sekolah yaitu SDN I Lamahala dan SDN II Lamahala. Pokjar ini masih menggunakan gedung SD untuk lokasi tutorialnya.

Dilain pihak mahasiswa juga tidak mengerti dengan pola tutorial dimana mereka menjawab bahwa pola tutorial di tempat mereka adalah :

“Pertemuan 10-11 kali ada yang 10 kali ada yang 11 kali untuk 1 mata kuliah. Tugas diberikan paling banyak 5 kali, pada pertemuan 2,3,6, sekitar 9 dan 10 yang mau mendekati ujian.”

Terlihat bahwa menurut mereka pola yang diketahui mahasiswa adalah pola dalam pemberian mata kuliah tutorial.

Lain lagi disampaikan oleh Bapak Kornelis Keraf (Pengurus Pokjar Waibalun) mengenai prosedur TTM di pokjar Waibalun :

“Prosedur pelaksanaan TTM di pokjarnya dimulai dengan pertama mahasiswa registrasi sesuai LIP yang dicetak UPBJJ–UT Kupang. Setelah itu para tutor diundang untuk mengikuti rapat pembahasan kalender dan jadwal tutorial yang diselenggarakan oleh pokjar. Sudah beberapa semester ada pembekalan bagi tutor tapi itu terjadi setelah kegiatan tutorial berjalan. Pada waktu yang ditentukan dimulai pelaksanaan kegiatan TTM sesuai kalender dan jadwal. Setelah selesai tutorial selama 8x maka tutor menyerahkan berkas pembelajaran dan nilai tutorial dan terakhir Pelaksanaan UAS di Waibalun.”

Lokasi tutorial di pokjar Waibalun menggunakan dua lokasi yaitu SMA Yohanis Paulus II dan SMPK Ratu Damai. Di pokjar Waibalun prosedur awal implementasi TTM menurut mahasiswa Mikhael Sogan Payong dimulai dari :

“Membayar registrasi di BRI mereka tinggal datang melihat jadwal tutorial yang sudah ditempel di sekretariat. Kita tutorial untuk semua mata kuliah.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Silvester Langga mahasiswa dari pokjar Waibalun :

“Setelah bayar di BRI kita tinggal mengikuti tutorial. Pertemuan dilakukan dua (2) kali dalam sebulan tepatnya hari Jumat dan Sabtu . Setiap semester dengan durasi waktunya dua jam untuk setiap mata kuliah. Perhitungannya minggu ke satu untuk PAUD, minggu ke dua untuk PGSD minggu ketiga untuk PAUD dan minggu keempat untuk PGSD, begitu seterusnya. ”

Prosedur TTM menurut tutor di Waibalun Theresia M. Rahaju bahwa :

“Sebelum tutorial dilaksanakan biasanya diadakan pertemuan yang diisi dengan pengarahan-pengarahan dan koordinasi pelaksanaan TTM termasuk jadwal dan tugas. Tutorial terjadi 8x, tugas yang diberikan kepada mahasiswa dikumpulkan pada pertemuan 3, 5, 7.”

Tanggapan mereka mengenai tata cara /prosedur implementasi TTM . Menurut pengurus pokjar Kornelis Keraf menyatakan :

“Menerima dan siap melaksanakan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh UT. Alasannya dalam melaksanakan TTM di Pokjar Waibalun baik pokjar, tutor dan Mahasiswa mempunyai panduan yang jelas tentang kalender dan Jadwal pada setiap Masa Registrasi”

Sedangkan tugas UPBJJ dalam implementasi TTM menurut Kornelis Keraf :

“Fasilitasi Registrasi mahasiswa setiap semester, pengadaan bahan ajar, monitoring kegiatan TTM, pengawasan UAS, penyamaan persepsi PKP dan PKM, rekrutmen tutor”.

Ada hal lain yang disampaikan oleh Silvester Langga mengenai peranan UPBJJ implementasi TTM :

“Selain mengawas dan mengkoordinir setiap TTM dan pada waktu ujian semester alangkah baiknya bapak-ibu dari Propinsi meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi khusus tentang proses penilaian TTM itu sendiri apakah dapat membantu nilai ujian itu sendiri sebab selama ini yang kami alami ada tugas yang diberikan oleh tutor ada sebagian mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan baik dan diserahkan pada bapak-ibu tutor tetapi kenyataannya nilai ujiannya rendah bahkan memperoleh nilai eror sedangkan ada beberapa mahasiswa yang jarang mengerjakan tugas dan jarang pula bertatap muka dapat memperoleh nilai yang baik dan ini dipertanyakan oleh sebagian mahasiswa”.

Untuk solusi dalam perubahan atau perbaikan dalam implementasi tutorial menurut mahasiswa :

“Waktu tatap mukanya alangkah baiknya dilakukan pada pagi hari sehingga tidak terjadi kejenuhan dari mengantuk, sebab jika dilakukan pada pukul 13.00

– 19.00 wita banyak mahasiswa merasa kelelahan dan daya serapnya kurang begitu maksimal.”

Dari hasil pengamatan dan jadwal tutorial yang didapat diketahui bahwa di pokjar Waibalun Implementasi TTM dilaksanakan untuk semua mata kuliah baik itu mata kuliah yang wajib ditutorialkan maupun untuk mata kuliah yang tidak wajib ditutorialkan. Waktu tutorial full dilaksanakan dari siang hari sampai malam. Pelaksanaan TTM di pokjar Waibalun dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu setiap dua minggu sekali. Apabila TTM untuk S1 PGSD dilaksanakan minggu pertama, maka untuk minggu kedua untuk TTM S1 PGPAUD, lalu minggu ketiga untuk S1 PGSD. Tutorial dilaksanakan dari bulan 26 September 2014 dan berakhir 22 Nopember 2014 setiap hari Jumat dan Sabtu Pokjar ini juga semua mata kuliah ditutorialkan kepada mahasiswa tetapi tidak melalui proses tutorial Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) sehingga nilai-nilai dari mata kuliah yang tidak wajib akhirnya tidak diakomodir ke dalam nilai ujian mahasiswa. Seperti yang dikemukakan oleh Kornelis Keraf :

“Sudah dari dulu kita mentutorialkan semua mata kuliah dengan tujuan untuk membantu mahasiswa untuk dapat mengerti. Awalnya saya tidak tahu kalau ada tutorial ATPEM. Nanti semester berikut saya ikuti prosedurnya”.

Pola tutorial yang dilaksanakan di pokjar Waibalun :

“Model/pola Implementasi TTM di pokjar kami adalah menggunakan sistem Semi Blok”.

Dari informasi Koordinator BBLBA :

“Pokjar Waibalun memang melaksanakan pola tutorial Semi Blok, tetapi tidak mengajukan ijin ke PR III UT”. Kita sudah menginformasikan agar membuat ijin tetapi tidak dilaksanakan oleh pengurus, sudah ada teguran”.

b. Pemahaman Aparat Pelaksana dan Mahasiswa Dalam Implementasi TTM

Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa (Katalog UT, 2013). Untuk dapat menghasilkan tutorial yang bermutu seorang tutor maupun pengurus harus betul-betul memahami prosedur TTM. Berikut

penjelasan dari pengurus pokjar dan tutor di pokjar Adonara Timur mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap implementasi TTM. Menurut pak Samsudin :

“Pengetahuan tutor tentang prosedur implementasi tatap muka baik dan mantap karena rata-rata tutor yang ada sudah berpengalaman mengajar di pokjar sejak tahun 2008.1 sampai dengan sekarang. Pada awal semester kami dari pokjar Adonara Timur selalu mengirimkan semua berkas mengenai tutorial yang terdiri dari daftar pembagian mata kuliah untuk para tutor, jadwal kegiatan tutorial, berkas permohonan lamaran tutor beserta kelengkapannya, jadwal kegiatan praktik baik itu PKP atau PKM, daftar nama sekolah tempat praktik PKM, nama mahasiswa yang mengikuti PKP/PKM, nama-nama supervisor I dan II, dan daftar nama mahasiswa yang ujian ujian praktek PKP/PKM, tanggal ujian dan penilai ujian. Semua itu di jilid menjadi satu dan dikirim sebanyak dua berkas ke UPBJJ-UT Kupang yang ditujukan untuk Koordinator BBLBB dan untuk PJW (penanggungjawab wilayah).” Setelah itu prosedur tutorial dilaksanakan. Setelah tutorial berlangsung nilai dimasukkan ke pengurus dan lalu dikirm ke UPBJJ. Nilai ujian biasa dititip pada petugas yang datang pada saat ujian berlangsung.

Tutor ibu Magdalena juga membenarkan :

“Pengetahuan para tutor dalam implementasi TTM menurut kami memadai, karena para tutor pengasuh mata kuliah hampir memiliki latar belakang pendidikan sesuai. Rata-rata para tutor mampu dalam tutorials. Kami melaksanakan tutorial sesuai dengan aturan, hanya pada saat pelaksanaan mahasiswa lebih banyak belum mempersiapkan diri jadi lebih kearah belajar mengajar”

Sedangkan menurut mahasiswa Ahmad Bata :

“Bukan untuk merendahkan yang seharusnya mengajar kami S2 yang latar belakang tidak diragukan lagi. Kami memahami masih ada keterbatasan-keterbatasan.

Tutor cukup mampu tapi masih kekurangan seperti pada tingkat disiplin ilmu mereka. Tutor juga membahas masalah di dalam kelas. Tapi kalau tutor sekolah lebih tinggi maka dia lebih bagus mengajar”.

Lebih lanjut dia menyatakan :

“Saya bisa menimbah/mendapat ilmu dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu terutama dalam mata kuliah statistika kamu cukup puas dengan tutor, bukan hanya beliau saja tapi rata-rata semua tutor. Kami cukup paham dalam tutorial, ketika kami bingung pada saat tutorial yang diberikan dan kami mendapat nilai tambah dari tutor yang cukup memuaskan bisa membawah ilmu ke tempat kerja”.

Dampaknya kami bisa membawah ilmu yang diberikan oleh tutor untuk kami dan bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Contohnya mata kuliah PTK (penelitian tindakan kelas), masalah-masalah yang timbul di kelas yang berasal dari siswa, guru disitu kami pakai untuk cari solusi. Kami perlu tutorial sangat perlu karena jika kami hanya sendiri belajar hal-hal yang khusus maka kami perlu bimbingan khususnya dalam mata kuliah esakta khusus

seperti statistika, pembelajaran matematika, kalau mata kuliah non eksakta bisa kami pelajari di lingkungan masyarakat seperti PKN.

Tutor Magdalena menyebutkan bahwa dampak dari kemampuan tutor dilihat dari :
“Hasil/perolehan nilai para mahasiswa dalam ujian maupun praktek cukup baik. Pemahaman mahasiswa pada awal tutorial mahasiswa baru, biasanya agak menuntut para tutor seperti kuliah penuh, tetapi akhirnya dipahami bagaimana tutorial sebenarnya.”

Tutor menyatakan bahwa mahasiswa di awal semester satu merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di Universitas Terbuka. Tetapi setelah waktu berlanjut maka mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem belajar jarak jauh. Seperti yang dikatakan oleh Pak Samsudin:

“Sesuai daftar isian/angket yang kami bagikan kepada para mahasiswa umumnya para tutor berkemampuan baik dan disenangi mahasiswa sehingga dampak yang ditimbulkan dari kemampuan implementasi tatap muka adalah nilai tugas tutorial yang diberikan oleh tutor untuk para mahasiswa, kelihatan seimbang dengan hasil UAS yang dicapai mahasiswa. Mahasiswa cukup memahami materi dengan tatacara implementasi tatap muka di pokjar Adonara Timur. Akhirnya mereka umumnya mendapat nilai lulus dengan kebanyakan tepat lima tahun mahasiswa bisa yudisium”.

Untuk memsukkseskan implementasi TTM semua pihak harus berupaya keras. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan menurut pak Samsudin :

“Untuk tutor selain mereka mengikuti pembekalan dari UPBJJ mereka juga dibagikan panduan tutorial sehingga mereka cukup memahaminya, sedangkan supaya mahasiswa dapat memahami dan mengerti dalam implementasi tatap muka, kepada para mahasiswa diberikan informasi, dorongan/motivasi baik langsung maupun lewat alat komunikasi”.

Ternyata dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini sangat berpengaruh terhadap implementasi TTM. Perkembangan komunikasi membawah dampak positif.

Menurut tutor Magdalena :

“Sebagai tutor harus ada persiapan diri dengan baik dengan menambah/mencari referensi untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang diberikan selama kegiatan tutorial. Menyelesaikan/membaca/memeriksa semua tugas yang diberikan kepada mahasiswa dengan member nilai. Lalu memacu mahasiswa untuk belajar sendiri dengan mencari informasi lewat berbagai media (internet, para guru senior) media cetak lainnya terutama mendalami modul dan mencoba untuk mempraktekkan di sekolah masing-masing”.

Mahasiswa juga selalu berusaha untuk dapat memahami setiap materi tutorial. Berbagai usaha baik dari mahasiswa dan tutor diperlukan. Seperti yang diinginkan oleh Ahmad Bata :

“Dalam tutorial didampingi dengan teknologi kalau bisa. Kami sebagai mahasiswa harus baca buku, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.”

Menurut hasil wawancara ini tersirat bahwa dalam Implementasi TTM aparat pelaksana TTM di Pokjar Adonara Timur sudah memahami prosedur TTM tetapi perlu ditingkatkan beberapa hal untuk mendukung Implementasi TTM seperti menggunakan teknologi untuk mendukung proses tutorial.

Di pokjar Waibalun, pemahaman aparat pelaksana dan mahasiswa mengenai TTM terlihat seperti yang disampaikan oleh Silvester Langga

“Menurut kami mahasiswa pengetahuan tutor bagus dalam tutorial satu tutor membahas materi, memberikan tugas, tugas diberikan pada setiap kali pertemuan.

Ada sebagian tutor dengan kemampuan dan pengalamannya yang begitu bagus, dan ada pula kemampuan dan pengalaman tutor yang begitu saja.”

Sedangkan dari sisi tutor, Ibu Theresia menyatakan bahwa pemahaman sebagai tutor yaitu:

“Saya sebagai tutor sudah mengikuti proram Pelatihan Tutor (PATUT) dan selalu menghadiri pertemuan-pertemuan yang mengenai informasi tentang pelaksanaan TTM. Kemampuan saya baik karena saya pernah disupervisi oleh supervisor dari UT Pusat.

Menyangkut dampak dari pemahaman tutor terhadap Implementasi TTM menurut ibu Theresia :

“Dari kemampuan tutor yang baik maka mahasiswa termotivasi untuk selalu serius. Pemahaman mahasiswa dalam kegiatan tutorial khususnya mahasiswa yang sudah lama menjadi guru merasa kesulitan apalagi untuk matakuliah Bahasa Inggris. Itu sebabnya

tutor harus selalu mengikuti perkembangan atau informasi baik tentang materi tutorial maupun perkembangan teknologi sedangkan untuk mahasiswa harusnya modul sudah ditangan mahasiswa sebelum kegiatan TTM dan selalu memotivasi mahasiswa untuk belajar bersama-sama bagi mahasiswa yang berdekatan”.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat pelaksana Implementasi TTM di tingkat pokjar yaitu pengurus dan tutor menunjukkan bahwa mereka sudah memahami dengan jelas mengenai prosedur Implementasi TTM baik itu dari sisi pengurus, tutor maupun mahasiswa.

c. Koordinasi antara Aparat Pelaksana

Kordinasi antara aparat pelaksana dalam implementasi TTM sangat dibutuhkan

Menurut pak Kornelis Keraf :

“Koordinasi baik dengan UPBJJ, tutor dan mahasiswa lewat telp dan kirim email sedangkan kelemahannya dalam bahan ajar. Modul pada semester ini datang sebelum tutorial dimulai, tapi untuk modul agama dan paket semester satu yang dikirim menyusul. Sedangkan untuk semester yang lalu selalu datang terlambat. Tutorial sudah dimulai baru modul tiba, itupun masih banyak modul yang tidak pas dengan jumlah mahasiswa. Kalau di semester 2014.2 biasa modul tidak terlalu terlambat datang, tapi pada 2014.1 modul sangat terlambat. Ketika di cek ke Kupang katanya sudah dikirim tapi masih dalam perjalanan karena alasan Feri tidak jalan disebabkan cuaca yang tidak baik. Kita tunggu sampai bulan Mei itu tutorial sudah pertemuan ke 5 baru modul datang. Mahasiswa banyak yang komplain karena mereka tutorial tidak mempunyai modul”.

Juga menurut tutor Theresia :

“Koordinasi dengan pengurus dan mahasiswa baik, hanya kelemahannya dari sistem koordinasi ini para tutor merasa keberatan kalau tiap semester harus menyerahkan data pribadi/bahan tutorial. Ada file di pokjar UPBJJ atau pokjar sehingga kalau dibutuhkan tidak harus diminta ke tutor (terutama yang sudah baku misal ijasah, sertifikat, RAT dan SAT) kecuali tutor yang baru”.

Lebih lanjut menurut mahasiswa Silvester Langga :

“Sistem koordinasi pada awalnya kurang berkenan di hati mahasiswa tetapi pada tahun-tahun berikutnya sudah ada perubahan dengan adanya sosialisasi tentang perkuliahan, tentang bagaimana dengan mahasiswa yang alihkredit. Kurangnya sosialisasi dalam memahami proses perkuliahan dan nilai tutorial dan nilai tugas yang diberikan oleh bapak-ibu tutor yang harus dilakukan. Tingkatkan koordinasi dengan mahasiswa. Kita di semester tujuh baru tahu tentang proses perkuliahan setelah ada petugas dari propinsi yang memberikan sosialisasi. Angkatan kami pada awal sempat berselisih dengan pengurus pokjar karena tidak ada penyampaian informasi yang jelas mengenai perkuliahan di pokjar Adonara Timur”.

Sedangkan di koordinasi di pokjar Adonara Timur nampak dari yang dikatakan Ahmad Bata :

“Koordinasi baik khususnya modul datang tepat pada waktunya, nilai ujian baik diberikan pada pokjar, registrasi baik. Ambil biling lalu bayar di bank lalu copi biling masukkan ke panitia langsung tukar dengan jadwal tutorial. Sehingga saya rasa Tidak ada kelemahannya.

Koordinasi untuk tutor dengan pengurus baik, jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial disampaikan kepada pengurus dan pengurus memanggil

mahasiswa untuk menegur, khusus untuk mahasiswa muda kurang nyaman dikelas, pengurus berikan ancaman bahwa nanti nilai tutorialnya buruk. Ancaman dalam bentuk lisan untuk menyadarkan mahasiswa dan memberikan penjelasan bahwa mahasiswa yang rugi.

Koordinasi tutor dengan pengurus cukup bagus, hambatan-hambatan dalam kegiatan tutorial langsung ditanggapi oleh pengelola/pengurus dan langsung diambil jalan keluar”.

Lebih lanjut disampaikan oleh tutor Magdalena :

“Menurut kami sistem koordinasi ini baik dan perlu ditingkatkan sehingga informasi bagi mahasiswa bisa lebih cepat dan tidak menimbulkan kegelisahan mahasiswa. Contohnya (modul) lebih awal diadakan.

Saya rasa sudah bagus tidak ada masalah, ada perubahan apa, jadwal tinggal kita kontak sehingga mahasiswa tidak dirugikan. Mahasiswa PAUD tidak pernah ada kelas kosong mahasiswa rindu datang kuliah.

Menurut pengurus pokjar mengenai sistem koordinasi di pokjanya :

“Sistem koordinasi antara pokjar dengan UPBJJ biasanya konsultasi lewat telepon maupun dilaksanakan secara langsung ketika pengurus berkunjung ke UPBJJ UT Kupang. Yang kami rasakan selama ini, kelemahan sampai menghambat semua kegiatan tidak pernah ada karena selalu diadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi langsung.

Yang harus dilakukan pengurus pokjar supaya sistem koordinasi semakin baik adalah komunikasi secara kontinyu dengan para pihak yang berkepentingan.

d. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Implementasi TTM

Implementasi TTM membutuhkan banyak pihak yang saling berkoordinasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi TTM di pokjar Waibalun menurut pengurusnya :

“Yayasan Penyelenggara tempat bernaungnya Pokjar Waibalun, Pengurus Pokjar Waibalun, Kepala sekolah tempat penyelenggaraan Tutorial dan Pelaksanaan UAS setiap semester.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh tutor :

“Ketua pokjar/penanggungjawab Pokjar, staf pokjar, tutor dan mahasiswa”.

Sedangkan menurut mahasiswa yang terlibat dalam Implementasi TTM :

“Bapak –ibu guru yang sudah lama berkompeten dalam bidangnya dengan segudang pengalaman baik secara teori maupun prakteknya. Bapak-ibu pengelolah pokjar Waibalun yang juga berkompeten dalam bidangnya.”

Menurut tutor Theresia :

“Ketua pokjar bertugas memberi arahan, informasi, memantau dan fasilitasi TTM, staff pokjar membantu kelancaran pelaksanaan, siap ruang, jadwal dan administrasi. Tutor mempersiapkan RAT/SAT, melaksanakan TTM, tugas-tugas mengisi format nilai dan absen. Sedangkan mahasiswa tugasnya hadir di TTM mengerjakan tugas dan mengikuti ujian”.

Pihak –pihak yang terlibat dalam implementasi TTM menurut Pak Samsudin Subang :

1. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur sebagai penanggung jawab utama.
2. Camat Adonara Timur sebagai pelindung.
3. Staf UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur sebagai pengurus .
4. Para Kepala Sekolah tempat tutorial sebagai penyedia tempat.
5. Para Kepala UPTD pada 8 Kecamatan sebagai penanggung jawab, penguasa dan mitra kerja dalam kegiatan praktek PKP dan PKM mahasiswa pada sekolah-sekolah di wilayah binaan mereka.

tugas mereka adalah :

Fungsi dari masing-masing petugas : Camat sebagai pelindung dan penasehat, Kepala UPTD sebagai penanggung jawab pelaksana UT di wilayah Adonara dan Kepala Sekolah sebagai pemberi ijin untuk kegiatan mahasiswa UT di sekolah.

Yang paling dominan dalam implementasi TTM adalah :

“Para Tutor, Para Kepala Sekolah tempat tutorial, para pengurus”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Magdalena

“Bahwa yang terlibat dalam implementasi TTM di pokjar ini paling kurang panitia penyelenggara, para tutor, para mahasiswa”. UPBJJ-UT, pengurus pokjar Adonara, para tutor, para mahasiswa. Tugas tutor merencanakan pelaksanaan kegiatan di tiap-tiap pokjar. Yang paling dominan adalah Mahasiswa”.

Menurut mahasiswa Adonara :

“Mahasiswa dengan tutor. Guru-guru bukan hanya yang berasal dari SMAN 1 Adonara Timur saja, tetapi yang berasal/tersebar dari wilayah Witihama, Lamaholot, tutor saja.”

Tugas Mahasiswa datang untuk belajar, memecahkan masalah yang kami tidak tahu menjadi tahu lalu mengerjakan tugas. Tutor memberikan solusi atau pemahaman hal-hal yang bersifat ilmiah yang sulit kami (mahasiswa) tahu. Kadang tutor tidak tahu kita mencari tahu bersama nanti dibahas dalam pertemuan berikutnya. Yang paling dominan menurutnya mahasiswa karena tutor hanya mendampingi ketika kami tutorial, hal yang banyak mencari dan menemukan masalah, jika tidak tahu bisa berdiskusi dengan tutor, tutor hanya memberikan arahan”.

Kondisi yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat, Pak Samsudin menyatakan bahwa :

“Dapat memotivasi para mahasiswa untuk aktif tutorial secara kontinyu serta timbul niat dan semangat pengabdian untuk yang tinggi untuk menjadikan mahasiswa UT khusus guru SD menjadi guru yang profesional”.

Sedangkan menurut tutor :

“Kondisi yang seharusnya ada dalam situasi yang tenang, saling bekerja sama untuk mempersiapkan diri dengan baik, kondisi kelas dan ruang yang baik”.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

1. Intensitas Sosialisasi dalam Implementasi TTM

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi mengenai implementasi TTM antara aktor kebijakan dan pelaku kebijakan. Dari hasil observasi bahwa selalu ada sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang terjadi selama ini antara UPBJJ-UT Kupang dan pengurus pokjar dilakukan via surat-menyurat, telepon dan email. Segala informasi terbaru mengenai Implementasi TTM selalu disampaikan kepada pengurus dan pengurus tinggal melanjutkan kepada tutor dan mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Pak Samsudin Subang :

“Sosialisasi mengenai TTM antara pokjar dengan UPBJJ biasanya lewat telepon maupun dilaksanakan secara langsung ketika pengurus berkunjung ke UPBJJ- UT Kupang. Ada juga pada saat kegiatan koordinasi PKP atau PKP di pokjar kalau pada awal tahun biasanya lewat kegiatan Rapat Koordinasi Pengurus, disana kita diberi informasi baru mengenai registrasi, tutorial, ujian,

UPI, dan lain-lain. Semua urusan selalu diadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi langsung”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Kornelis Keraf :

“Sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung selalu ada. Apabila ada perubahan selalu informasikan. Lewat email dan surat. Untuk tutor selalu disampaikan pada pertemuan pembekalan tutor yang dilakukan oleh staf UPBJJ-UT Kupang, hampir setiap semester ada pembekalan tutor.

Sedangkan mahasiswa dari waibalun menyatakan :

Sosialisasi mengenai TTM belum terlalu diberikan oleh pengurus pokjar. Kita masukan D2 jadi kita harus menyesuaikan proses pembelajaran di UT dengan waktu kita D2 dulu. Tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan.”

2. Transformasi (*transmission*)

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Kejernihan informasi mengenai implementasi TTM.

Di Pokjar Adonara, Pengurus pokjar mengatakan :

“Semua informasi mengenai kuliah di UT sudah kami sampaikan pada saat pertemuan setiap awal semester, waktu musim registrasi. Lalu jika ada hal baru disampaikan pada saat waktu tutorial, baik itu kepada tutor maupun mahasiswa”.

Hal itu juga dibenarkan oleh para tutor dan mahasiswa bahwa semua informasi baru selalu disampaikan. Akan tetapi di Waibalun ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara jelas kepada aparat pelaksana, seperti yang dikatakan oleh tutor Theresia :

“Semua informasi mengenai tutorial dikasitau, tapi kalau tentang honor tutor tidak pernah dikasih tahu berapa jumlahnya. Pada saat habis tutorial langsung ditranfer ke rekening”.

3. Kejelasan Informasi (*clarity*)

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa informasi yang disampaikan baik dari UPBJJ, pengurus semuanya jelas dan dapat kami pahami.

berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak ada hambatan dalam komunikasi mengenai implementasi TTM. Menurut tutor adonara :

“Selama ini kami hampir tidak pernah menemukan hambatan karena selalu ada informasi apabila ada sesuatu perubahan dan informasi yang diberikan jelas dan dapat kami pahami”.

4. Konsistensi Pesan

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Ketika ditanyakan mengenai konsistensi informasi TTM, semua informan menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan segera tindak lanjuti oleh UPBJJ dan pengurus pokjar siap melaksanakan. Pak Samsudin menyatakan :

“Di UT itu kalau aturan sudah dikeluarkan harus diikuti oleh semua baik pengurus, tutor atau mahasiswa, karena tidak ditatati maka akan mendapat masalah dengan nilai mahasiswa yang tidak keluar sehingga semua kami ikuti. Tidak ada hambatan, ketika ada masalah pengurus/pokjar langsung menghubungi mahasiswa atau tutor lewat telpon”.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua informasi tidak ada yang saling bertentangan semuanya ada keterkaitan dalam proses di dalam proses implementasi TTM.

b. Sumber-Sumber

Dalam Implementasi TTM dibutuhkan sumber-sumber pendukung untuk kelancaran implementasi. Sumber – sumber yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun fasilitas yang mendukung.

menurut mahasiswa Adonara mengenai sumber-sumber pendukung Implementasi :

“Tingkat pendidikan tutor kalau bisa semua S2. tutor banyak yang kurang tau teknologi mungkin karena tutor sudah tua, tutor banyak yang beurmur 40-an bisa dikatakan tua. Biaya disini untuk regis 1.150.000 ribu, SPP 250.000 untuk dipergunakan untuk membeli kursi, sewa gedung, menyewa tenaga-tenaga untuk membuka gedung, pengurus/pengelola bisa menggunakan untuk keperluan untuk data-data kami, contohnya misalnya untuk PKM nilai dan tugas (laporan) kami dibawah secara langsung ke kupang. Kami tidak merasa berat tapi kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dipersiapkan papan (*whiteboard*) karena disini kami gunakan papan biasa. Meja juga masih kurang, biasanya tutorial setengah dari kami yang duduk di depan yang pakai meja, dibelakang pakai kursi saja jadi mau tulis setengah mati”.

juga diutarakan oleh mahasiswa Waibalun :

kurangnya kursi dan meja sehingga ada beberapa mahasiswa yang meminjam kursi di ruang yang lainnya karena kursi yang ada disesuaikan dengan jumlah di sekolah tersebut. Itu terjadi karena kami digabung dari 2 kelas menjadi kelas tutorial”.

Sedangkan menurut tutor Adonara :

“Khusus untuk fasilitas harus pokjar sendiri belum memiliki gedung maka kami masih harus melaksanakan TTM di sekolah-sekolah yang terpisah”.

Tutor waibalun juga mengatakan bahwa :

“Kadang-kadang jumlah mahasiswa melebihi kemampuan ruangan (empat puluhan orang mahasiswa, pernah di atas 60 orang dalam 1 rombongan kelas tutorial)”.

Sumber pendukung untuk kelancaran Implementasi TTM salah satunya adalah ketersediaan modul. seperti yang diungkapkan oleh pengurs pokjar Waibalun :

“Modul pada semester ini datang sebelum tutorial dimulai, tapi untuk modul agama dan paket semester 1 yang dikirim menyusul. Sedangkan untuk semester yang lalu selalu datang terlambat. tutorial sudah dimulai baru modul tiba, itupun masih banyak modul yang tidak pas dengan jumlah mahasiswa. Kalau di semester 2014.2 biasa modul tidak terlalu terlambat datang, tapi pada 2014.1 modul sangat terlambat. ketika di cek ke kupang katanya sudah dikirim tapi masih dalam perjalanan karena alasan feri tidak jalan disebabkan cuaca yang tidak baik. Kita tunggu sampai bulan Mei itu tutorial sudah pertemuan ke 5 baru modul datang. Mahasiswa banyak yang complain karena mereka tutorial tidak mempunyai modul”.

Senada dengan yang disampaikan oleh tutor dari Waibalun ;

“modul sering terlambat dibagikan”.

Sumber keuangan juga menjadi keluhan dari para pengurus seperti yang disampaikan oleh Kornelis Keraf “

“honor tutor selalu terlambat dibayarkan dari UPBJJ, sedangkan tutor dilapangan sudah menagih uang mereka. Ada kesan seakan-akan kami pengurus yang tidak membayarkan. untuk 2014.1 saja honor tutor baru dibayarkan bulan Oktober, sedangkan honor supervisor dan penguji PKP, PKM belum kami terima. kalau bisa honor tutor dibayarkan setelah nilai dimasukkan. biaya untuk sekolah tempat tutorial juga kami rasakan sangat kecil. Mohon diperhatikan lagi.

Lebih lanjut menurut pengurus pokjar Adonara Timur :

“ untuk sumber daya manusia tidak ada masalah Untuk para tutor dan lain-lain tidak ada, para mahasiswa yang sering absen saat tutorial. Untuk pokjar

Adonara Timur berkaitan dengan dana, baik untuk operasional pokjar maupun keperluan tutor dan pengurus sering ketiadaan dana. Honor untuk sewa gedung tutorial dari itu saja sangat kecil jumlahnya. honor tutor untuk dibayar tepat pada waktunya. karena biasanya nilai kami kirimkan tepat waktu yang di minta UPBJJ, kami harap honor tutor juga dibayar tepat waktu. sedangkan Fasilitas Pokjar Adonara Timur tidak ada masalah .

mengenai honor tutor ada hal penting yang disampaikan oleh tutor waibalun ;

“honor yang diberikan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh koordinator.”

Setelah ditelusuri bahwa selama ini honor tutor di Waibalun tidak dibayarkan secara penuh kepada para tutor. Sesuai ketentuan 1 mata kuliah dibayarkan Rp 1.600.000 dipotong PPH. tetapi di Waibalun honor tutor dibayarkan hanya sebesar Rp 900.000/mata kuliah.

setelah dikonfirmasi dengan pengurus pokjar Waibalun menyatakan bahwa :

“Honor tutor kami bayar sbesar itu karena dibagi dengan tutor yang membawakan tutorial untuk mata kuliah yang tidak wajib ditutorialkan.”

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

mahasiswa adonara mengenai sikap pelaksana :

“tutor punya sikap seperti jam masuk terlambat dan kadang berhalangan mereka tidak menyampaikan kepada sekretariat, kadang kami bertanya ke sekretariat bilang tunggu saja”.

c. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Subarsono, 2011:92).

tanggapan semua informan terhadap struktur birokrasi dalam Implementasi TTM nampak bahwa struktur dalam Implementasi TTM tidak panjang dan berbelit-belit.

Menurut penuturan pak Samsudin Subang

“Struktur birokrasi (standar prosedur operasi) tidak ada, dulunya yang luar biasa bingung. Khusus waktu tahun 2011 ke bawah untuk pelaksanaan TTM tidak ada panduan yang jelas, waktu sudah ada pelatihan tutor semakin bagus karena informasi mengenai prosedur tutorial sudah diketahui secara jelas oleh para tutor yang sudah mengikuti pelatihan tutor. Waktu rakor juga dijelaskan, atau dikasitahu informasi baru dari PJW”

Maksud dari pernyataan beliau bahwa pada waktu yang lalu dirasakan prosedur TTM sangat membingungkan, tetapi setelah ada pelatihan tutor dan rakor maka komunikasi semakin lancar maka prosedur TTM dapat dimengerti dengan mudah.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

a. Tata Cara/Prosedur TTM di Pokjar Adonara Timur dan Waibalun

Implementasi kebijakan JKOP BB 03 tentang prosedur Tutorial Tatap Muka di Universitas Terbuka sudah memenuhi ketentuan dari sebuah implementasi kebijakan, seperti yang dikatakan oleh Anderson (Widodo, 2006:13) bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Dalam implementasi TTM di UPBJJ-UT Kupang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti pihak UT Pusat, UPBJJ-UT Kupang, pengurus pokjar, pihak Dinas Pendidikan/sekolah, tutor dan mahasiswa. Tindakan-tindakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar jarak jauh. TTM dilaksanakan karena mempertimbangkan bahwa mata kuliah itu dirasakan sangat sulit dipelajari sendiri oleh mahasiswa. hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Friedrich (Wahab, 1991:13) yang mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2006). Menurut Indiahono (2011), implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasa dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Sementara Riant Nugroho (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Dasar dari implementasi TTM adalah JKOP BB 03 Universitas Terbuka mengenai prosedur pelaksanaan TTM. Kebijakan ini menjadi pedoman penting bagi semua pihak yang terlibat dalam TTM baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat pokjar. Sesuai dengan teori di atas dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa implementasi TTM dalam hal tatacara/prosedur sudah terpenuhi, terlihat dari prosedur awal dari TTM adalah proses administrasi dimana mahasiswa dinyatakan sebagai peserta TTM dengan harus melakukan registrasi matakuliah lalu melakukan pembayaran di bank. Setelah pembayaran dilakukan mahasiswa maka mereka secara otomatis langsung menjadi peserta TTM. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan jumlah kelas tutorial dan penentuan tutor. Untuk kelas tutorial sudah dari awal mahasiswa masuk semester 1. Setelah itu dilanjutkan dengan proses rekrutmen tutor. Untuk tutor di kedua pokjar ini dibuat

pertemuan dimana tutor memasukkan lamaran tutor, kelengkapan administrasi lainnya. Tetapi tidak semua tutor membuat Perencanaan Tutorial (RAT/SAT, rancangan tugas, bahan presentasi) di awal semester. Dilanjutkan dengan proses penentuan lokasi tutorial yang sesuai dengan ketentuan UT. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh James Anderson (1979) bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana dikatakan oleh Anderson digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Setelah proses administrasi selesai maka dilanjutkan dengan proses implementasi TTM. Semua prosedur dilaksanakan hanya ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya prosedur pertemuan untuk TTM dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan dengan waktu tiap kali pertemuan sebanyak 120 menit atau 2 jam. Di Adonara pertemuan TTM dilaksanakan lebih dari 8 kali yaitu 11 sampai 12 kali pertemuan dengan waktu tiap TTM sebanyak 90 menit. Sedangkan di Waibalun tutorial dilaksanakan untuk semua mata kuliah tanpa prosedur tutorial ATPM sehingga mahasiswa dirugikan karena nilai tutorial mereka tidak bisa diakomodir ke dalam nilai ujian.

Pihak yang terlibat dalam implementasi TTM di kedua pokjar ini masing-masing untuk pokjar Adonara Timur ditangani oleh UPTD Dinas Pendidikan kecamatan Adonara Timur sehingga melibatkan Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur sebagai penanggung jawab utama Camat Adonara Timur sebagai pelindung. Staf UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur sebagai pengurus. Para Kepala Sekolah tempat tutorial sebagai penyedia tempat. Para Kepala UPTD pada 8 Kecamatan sebagai penanggung jawab, penguasa dan mitra kerja dalam kegiatan praktek PKP dan PKM mahasiswa pada sekolah-sekolah diwilayah binaan mereka. Sedangkan di pokjar Waibalun di bawah yayasan sehingga melibatkan pihak Yayasan Penyelenggara tempat bernaungnya Pokjar Waibalun, Pengurus Pokjar Waibalun, Kepala sekolah tempat penyelenggaraan Tutorial dan Pelaksanaan UAS setiap semester. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi TTM ini sesuai dengan pendapat dari Widodo (2008:91) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan

(*Policy Implementor*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut : Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah. Sektor *swasta* (*private sectors*), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat.

Sedangkan tugas UT dalam hal ini pihak UPBJJ-UT Kupang dalam implementasi TTM : Fasilitasi Registrasi Mahasiswa setiap semester, Pengadaan bahan ajar, Monitoring Kegiatan TTM, Penyamaan Persepsi PKP dan PKM dan Rekrutmen Tutor. UPBJJ-UT Kupang maupun UT Pusat selalu melaksanakan monitoring TTM ini sejalan sepaham dengan pendapat dari Widodo (2008:94) yang menyatakan bahwa pelaku control kebijakan dilihat dari asalnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu kontrol internal, dan kontrol eksternal. Pelaku kontrol internal (*internal control*) dapat dilakukan oleh unit bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah. Sementara itu, pelaku kontrol eksternal (*external control*) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM, dan komponen masyarakat.

Sedangkan saran untuk perbaikan implementasi TTM dari pihak pengurus menginginkan agar semua mata kuliah diwajibkan untuk ditutorialkan sehingga dapat membantu nilai mahasiswa. sedangkan dari pihak mahasiswa menginginkan agar waktu tutorial bisa disesuaikan sehingga tidak memberatkan mahasiswa.

Pola pelaksanaan TTM di pokjar Adonara Timur menggunakan pola biasa sedangkan di Waibalun menggunakan pola Semi Blok tanpa ijin dari Pembantu Rektor III UT.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur Implementasi TTM di pokjar Adonara dan Waibalun belum dilaksanakan sepenuhnya.

b. Pemahaman Aparat

Aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Implementasi TTM dirasakan sudah cukup memahami. Para tutor di kedua pokjar ini sudah sebagian mengikuti kegiatan Pelatihan Tutor (PATUT) yang diadakan oleh UT. Sehingga dalam melaksanakan TTM sesuai dengan prosedur UT. Hal ini terlihat pendapat para informan yang menyatakan bahwa proses TTM berbeda dengan proses belajar mengajar. Para tutor Di TTM hanya mendiskusikan hal-hal yang dirasakan sulit dipelajari atau dimengerti oleh mahasiswa. Para tutor selalu memacu mahasiswa untuk belajar sendiri dengan mencari informasi lewat berbagai media (internet, para

guru senior) media cetak lainnya terutama mendalami modul dan mencoba untuk mempraktekkan di sekolah masing-masing.

Tingkat pemahaman tutor yang baik terhadap implementasi TTM ini membawahkan dampak yang baik kepada mahasiswa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa bisa membawahkan ilmu yang diberikan oleh tutor terapkan di sekolah mereka masing-masing. Contohnya pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, mahasiswa merasa terbantu untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul di kelas dengan menggunakan cara ilmiah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Senada dengan pendapatnya Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, output dan outcome (Kusumanegara, 2010)

Akan tetapi masih banyak tutor yang mengeluhkan bahwa kelemahan dalam implementasi TTM yaitu mahasiswa kurang mempersiapkan diri. Mereka tidak pernah belajar sehingga pada saat tutorial bukan mendiskusikan hal-hal yang sulit tetapi melaksanakan proses belajar mengajar.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hampir semua aparat pelaksana dapat memahami dengan jelas tentang implementasi TTM.

c. Koordinasi

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa bentuk koordinasi antar aparat pelaksana implementasi TTM dalam bentuk surat-menyurat maupun melalui surat elektronik (email), melalui telp, atau secara tatap muka langsung. Informasi harus disampaikan secara langsung dan cepat sehingga paling banyak bentuk koordinasi dilakukan via telepon.

Bentuk koordinasi lainnya adalah dalam bentuk rapat koordinasi pengurus yang biasa dilaksanakan oleh UPBJJ-UT Kupang setiap awal tahun. Pada pertemuan tersebut pihak UPBJJ-UT menyampaikan semua informasi baik itu dari registrasi, tutorial, ujian dan lain-lain yang berhubungan dengan perkuliahan di UT. Pada saat itu juga para pengurus pokjar akan saling berbagi dengan teman-teman pengurus dari pokjar lain yang ada di wilayah UPBJJ-UT Kupang.

Begitupun koordinasi antara pengurus pokjar dengan mahasiswa berjalan baik, koordinasi dilakukan melalui pertemuan bersama, telepon maupun pengumuman di radio.

Riant Nugroho (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Koordinasi mengenai implementasi TTM di kedua pokjar ini sangat baik, sehingga pihak mahasiswa dapat mengetahui informasi terbaru. Hanya ada keluhan dari mahasiswa bentuk koordinasi apabila mahasiswa melakukan kesalahan pengurus mengancam bahwa nilai tutorial akan buruk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam implementasi TTM di kedua pokjar ini sudah berjalan dengan baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat.

a. Faktor Komunikasi Dengan Implementasi Kebijakan.

Informasi mengenai Implementasi TTM harus diteruskan kepada semua pihak yang terlibat baik itu UPBJJ-UT, pengurus pokjar, tutor maupun mahasiswa. Komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti oleh para aparat pelaksana sehingga tujuan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengamatan komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa hal penting dalam komunikasi implementasi kebijakan. Hal penting tersebut antara lain : intensitas sosialisasi, transmisi, kejelasan dan konsisten.

Faktor komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan adalah faktor kejelasan dan konsisten. Semua informasi mengenai implementasi kebijakan dapat dilaksanakan karena informasi yang diterima konsisten dan jelas. Sebab Apabila informasi yang diterima bertentangan maka akan merugikan mahasiswa.

Sedangkan faktor komunikasi yang menjadi penghambat dalam implementasi TTM dari sisi tranformasi pesan, karena masih ada informasi yang belum ditransformasikan seutuhnya kepada para aparat pelaksana. Seperti yang diungkapkan

oleh tutor Adonara mengenai Perencanaan Tutorial yang tidak diinformasikan kepada para tutor dan informasi mengenai honor tutor di Waibalun yang tidak ditransformasikan kepada para tutor.

b. Hubungan sumber-sumber dengan implementasi kebijakan

Grindle (1980) mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan (Winarno 2012:149).

Dalam praktik implementasi hal yang perlu mendapat perhatian adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau peransang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan. Sumber-sumber disini mencakup sumber daya manusia yang memadai, fasilitas yang menunjang dan keuangan yang mencukupi dan adanya informasi dan kewenangan yang jelas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sumber yang mendukung implementasi kebijakan adalah :

Sumber daya manusia, seperti yang ditegaskan oleh Edward III bahwa sumber daya manusia (staf), harus cukup jumlah dan cakap (keahlian). Dikedua pokjar ini sumber daya tutor kuantitasnya tercukupi karena masing-masing tutor hanya menjadi tutor maksimal 3 kelas tutorial atau 3 mata kuliah. Yang menjadi penghambat di sumber daya manusia adalah latar belakang pendidikan tutor yang belum memenuhi prosedur dari UT. UT menetapkan tutor harus berkualifikasi pendidikan S2 tetapi kenyataan di lapangan hampir semua tutor berlatar belakang pendidikan Strata 1.

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam berhasilnya implementasi kebijakan. UT menyediakan anggaran untuk pembiayaan Implementasi TTM seperti pembiayaan gedung sekolah yang digunakan untuk tutorial dan honor untuk tutor. Akan tetapi biaya tersebut selalu dibayarkan terlambat oleh UPBJJ-UT Kupang. Seperti hasil wawancara dimana para pengurus selain terlambat jumlah anggaran untuk membayar sewa gedung tutorial sangat kecil. Selain itu

hambatan lainnya menyangkut honor tutor. Dalam implementasi TTM disediakan honor tutor yang dibayarkan untuk setiap mata kuliah sebesar Rp. 1600.000/mata kuliah dipotong PPH. Tapi dalam pelaksanaannya di pokjar Waibalun para tutor hanya dibayarkan kurang dari itu seperti yang dikatakan tutor Waibalun :

“Honor tutor yang diberikan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh koordinator

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil (Winarno 2012:191).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas sangat kurang dalam implementasi TTM. Di kedua pokjar masih ada pengeluhan mengenai fasilitas kursi dan meja yang digunakan dalam kelas tutorial. Banyak mahasiswa yang harus duduk berdua menggunakan satu meja. Seperti kutipan wawancara dengan mahasiswa Adonara Timur :

“Kalau bisa dipersiapkan papan (*whiteboard*) karena disini kami gunakan papan biasa. Meja juga masih kurang, biasanya tutorial setengah dari kami yang duduk di depan yang pakai meja, dibelakang pakai kursi saja jadi mau tulis setengah mati”.

Selain fasilitas kursi dan meja, ada bahan ajar mahasiswa (modul) yang sering terlambat di lokasi tutorial. Seperti hasil wawancara dengan pengurus pokjar Waibalun:

“Modul pada semester ini datang sebelum tutorial dimulai, tapi untuk modul agama dan paket semester 1 yang dikirim menyusul. Sedangkan untuk semester yang lalu selalu datang terlambat. tutorial sudah dimulai baru modul tiba, itupun masih banyak modul yang tidak pas dengan jumlah mahasiswa. Kalau di semester 2014.2 biasa modul tidak terlalu terlambat datang, tapi pada 2014.1 modul sangat terlambat. ketika di cek ke kupang katanya sudah dikirim tapi masih dalam perjalanan karena alasan feri tidak jalan disebabkan cuaca yang tidak baik. Kita tunggu sampai bulan Mei itu tutorial sudah pertemuan ke 5 baru modul datang. Mahasiswa banyak yang complain karena mereka tutorial tidak mempunyai modul”.

C. Disposisi

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementers*) mengetahui apa harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Faktor yang menjadi pendukung terhadap implementasi kebijakan adalah keinginan para aparat pelaksana (pengurus pokjar, tutor) untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat disposisi terhadap implementasi kebijakan yaitu tingkat disiplin. Para tutor banyak yang apabila berhalangan tidak menginformasikan kepada mahasiswa atau pengurus pokjar sehingga mahasiswa dirugikan.

d. Struktur Birokrasi

Jones (1997) mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor (Tangkilisan 2003:17). Pengertian ini lebih menitikberatkan kepada birokrasi sebagai eksekutor utama dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi juga harus mendukung, struktur yang panjang dan berliku-liku tentu akan menghambat dan sebaliknya struktur birokrasi yang pendek akan semakin memudahkan proses implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Di struktur birokrasi salah satu hal penting mencakup standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Yang menjadi penghambat Struktur Birokrasi terhadap kebijakan yaitu tidak adanya SOP mengenai implementasi TTM di tangan pengurus pokjar, yang selama ini mereka kerjakan berdasarkan surat pemberitahuan dari UPBJJ atau informasi melalui telpon dari para penanggung jawab wilayah. Sehingga kadangkala para pengurus lebih banyak menunggu petunjuk dari UPBJJ. Edward III mengatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi tidak efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (Widodo, 2008:106). Sedangkan yang menjadi pendukung kebijakan adalah isi dari SOP itu mudah dipahami dan sudah dilaksanakan oleh semua aparat pelaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan

Prosedur dalam implementasi kebijakan TTM sudah dilaksanakan berdasarkan JKOP BB 03. Akan tetapi masih ada pokjar yang tidak melaksanakan dengan sepenuhnya, seperti waktu tutorial yang tidak mencapai 120 menit di pokjar Adonara Timur, pertemuan tutorial lebih dari delapan kali tatap muka dan pelaksanaan tutorial semi blok tanpa ijin PR 1 yang terjadi di pokjar Waibalun.

Semua aparat pelaksana sudah memahami mengenai implementasi TTM. Terlihat bahwa proses tutorial di sudah dilaksanakan semua dengan prosedur yang ditentukan oleh Universitas Terbuka.

Koordinasi antar sesama aparat pelaksana juga terjalin dengan baik dimana koordinasi tercipta antara UPBJJ-UT Kupang, pengurus pokjar, Dinas Pendidikan/ yayasan, pihak kepala sekolah, tutor dan mahasiswa.

2. Pendukung dan Penghambat

Faktor komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan adalah faktor kejelasan dan konsisten. Semua informasi mengenai implementasi kebijakan dapat dilaksanakan karena informasi yang diterima konsisten dan jelas. Sedangkan kelemahannya pada transformasi dimana informasi mengenai TTM tidak ditransformasikan secara utuh kepada para aparat pelaksana (tutor).

Faktor pendukung dari faktor sumber daya manusia adalah ketersediaan tutor dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Sedangkan faktor penghambatnya masih banyak tutor yang berlatarbelakang pendidikan strata satu.

Faktor penghambat dari sumber-sumber yaitu kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi di dalam ruangan tutorial, sering terlambatnya modul tiba di pokjar, kecilnya

biaya untuk lokasi tutorial dan terlambatnya pencairan honor tutorial dan pembayaran honor tutor yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Selanjutnya faktor pendukung dari disposisi adanya kemauan dari aparat pelaksana untuk melaksanakan TTM dengan serius. Sedangkan kelemahannya masih ada tutor yang kurang disiplin waktu.

Pada faktor pendukung di struktur organisasi adalah prosedur yang sudah dijalankan dan mudah dimengerti. Sedangkan faktor penghambatnya ketiadaan Standar Operasi Prosedur TTM di tangan pengurus pokjar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya berguna untuk perbaikan dan menyempurnakan dalam implementasi kebijakan TTM.

1. Perlu adanya teguran dari UPBJJ-UT pada pokjar yang melaksanakan tutorial tidak sesuai dengan ketentuan UT seperti jumlah pertemuan dan waktu tutorial.
2. Memperbanyak kegiatan koordinasi antara UPBJJ UT dan pengurus pokjar
3. Meningkatkan kordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan modul tepat pada waktunya
4. Mengingatkan tutor untuk disiplin dengan waktu tutorial.
5. Memberikan Standar Operasi Prosedur TTM kepada pengurus pokjar dan tutor sehingga mereka bisa mempelajari dan melaksanakan TTM sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Helson Hall Publisher, Chicago.

Indiahono, Dwiyanto, 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis, Gaya Media, Yogyakarta.

Kadarwati, Tri, 2007, Perbandingan Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.

- Kusumanegara Solahudin, 2010, Model-model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Gaya Media, Yogyakarta
- Nugroho Riant, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Riduwan, Dr, 2010, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung
- Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1982. Bureaucracy and Policy Implementation. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Subarsono, Ag, 2011, Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, Dr, Prof, 2011, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Tamonob Goerge, 2011, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Kupang, Undana, Kupang.
- Universitas Terbuka, 2010, Katalog Universitas Terbuka Tahun, 2010, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Univeristas Terbuka, 2013, Katalog Program Pendas, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Universitas Terbuka, 2005, Pedoman Tutorial S1 PGSD, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Uno Hamzah, 2005, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.
- van Meter, Donalds and Carl E. van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework". Administration and Society, Vol. 6 No. 4 February.
- Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta
- Waluyo, 2007, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Impelmentasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Mandar Maju, Bandung.
- Haholongan Simanjuntak, Maman Rumanta, 2013, Kualitas Pelaksanaan tutorial Tata Muka S1 Pendas Di UPBJJ –UT pangkal Pinang , Jurnal Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Volume 14 Nomor 2.
- Malta, 2011, Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Tutorial Tatap Muka Program Pendidikan Dasar Di Upbjjut Banda Aceh, Jurnal Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Volume 12 Nomor 1.
- Majalahsiantar.blogspot.com/2012/10/faktor-yang-mempengaruhi-proses-belajar.html. diakses pada Sabtu, 21-2-2014, pukul 12.10 wita).
- Adibubaida.wordpress.com/2010/07/03/makalah faktor-faktor yang keberhasilan belajar mengajar (diakses pasa Sabtu, 21-02-2014, pukul 14.35 wita).

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yusinta Natalia Fina, S.sos,M.si
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Staf Pengajar
4.	NIP	198312212008012002

5.	NIDN	0021128301
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Oebufu, 21 Desember 1983
7.	E-mail	yusinta@ut.ac.id
8.	No. Telp/HP	085339292775
9.	Alamat Kantor	UPBJJ-UT Kupang, Jl Pulau Indah 06 Oesapa Barat
10.	No. Telp/Fax	03808553825
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Perguruan Tinggi	Univeristas Nusa Cendana	Univeristas Nusa Cendana
Bidang Ilmu	Administrsi Negara	Administrasi
Tahun Masuk-Lulus	2002 - 2007	2011 - 2013
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kab. Alor	Pengaruh Penilaian Kinerja dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja di UPBJJ-UT Kupang
Nama Pembimbing/Promotor	Drs Yusuf Kuahaty, SU Markus Tae, S.sos, M.Si	DR. Lenny Tamunu, SU DR. Petrus Kase, M.Sc.soc

3.7 Rencana Biaya Penelitian

Rencana biaya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Honor						
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor pe Tahun (Rp)		
				Th 1	Th ...	Thn
Ketua				1.500.000		

Anggota 1				1.500.000		
SUB TOTAL (RP)				3.000.000		
2. Peralatan Penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang		
				Th 1	Th	Thn
Peralatan Penunjang 1				1.000,000		
Peralatan Penunjang 2						
Peralatan Penunjang 3						
SUB TOTAL (RP)				1.000,000		
3. Bahan Habis Pakai						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)		
				Th 1	Th	Thn
SUB TOTAL (RP)				1.500,000		
4. Peralatan						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)		
				Th 1	Th	Thn
Perjalanan ke tempat/kota-A	Survei/sampling/dll			3.000,000		
Perjalanan ke tempat/kota-n						
SUB TOTAL (RP)				3.000,000		
5. Lain-lain						
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)		
				Th 1	Th	Thn
Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan)	survei/sampling			1,500,000		
SUB TOTAL (RP)				1.500.000		
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (RP)				Th 1	Th	Thn

	10.000.000		
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (RP)	10.000.000		

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No .	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2010	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab	UT	Rp

		Penyimpangan UAS di Kab. Sumba Timur		10.000.000
--	--	--------------------------------------	--	------------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Fundamental.

Kupang, 24 Februari 2014
Pengusul,

(Yusinta Natalia Fina, S.Sos, M.Si)

